



**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	:	i
BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	1
		1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan PPAS	2
BAB II	:	RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH.....	7
		2.1 Rencana Pendapatan	7
		2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan.....	8
BAB III	:	PRIORITAS BELANJA DAERAH..	11
		3.1 Prioritas Pembangunan Nasional.....	11
		3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	24
		3.3 Prioritas Pembangunan Daerah	33
BAB IV	:	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN.....	271
		4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	271
		4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	332
BAB V	:	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	333
		5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan	333
		5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan.....	333
BAB VI	:	PENUTUP	335

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 265 ayat 3 yang mengatur bahwa penyusunan KUA dan PPAS, kepala daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan PPAS merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan APBD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari proses penyusunan APBD Tahun 2023, dokumen PPAS berisikan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah serta juga guna menjaga kesinambungan dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019-2023;
24. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.
25. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah disusun secara rasional dan memperhitungkan segala potensi pendapatan dan pembiayaan yang terukur dengan mempertimbangkan asumsi dan kondisi fiskal nasional.

2.1 Rencana Pendapatan

Pada penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, Pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai direncanakan sebesar Rp.834.383.586.691 Adapun komponen pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.38.351.102.083, pendapatan transfer sebesar Rp.792.114.526.944, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.3.917.957.664.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah sebesar Rp.5.820.391.725, retribusi daerah sebesar Rp.8.976.710.358, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.13.099.000.000 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.10.455.000.000.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.820.391.725.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada tahun anggaran 2023, penerimaan retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 8.976.710.358.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Penetapan APBD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 13.099.000.000.

2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun anggaran 2023 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 10.455.000.000.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2023 diprediksi sebesar Rp. 792.114.526.944. terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.765.811.096.751, dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.26.303.430.192.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2023 diproyeksikan berasal dari pendapatan hibah yaitu sebesar Rp. 3.917.957.663.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 diproyeksikan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu sebesar Rp. 39.594.064.985.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.351.102.083	
4.1.01	Pajak Daerah	5.820.391.725	
4.1.02	Retribusi Daerah	8.976.710.358	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.099.000.000	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.455.000.000	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	792.114.526.944	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.811.096.751	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.303.430.193	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.917.957.664	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.917.957.664	
	JUMLAH PENDAPATAN	834.383.586.691	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.594.064.985	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.594.064.985	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.594.064.985	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	873.977.651.676	

Adapun penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.39.594.064.985. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya tahun 2022. Dengan menggunakan asumsi bahwa

pendapatan dan belanja dapat optimal maka diperkirakan SiLPA Tahun 2023 akan mencapai Rp.39.594.064.985.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa total pendapatan tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.834.383.586.691, sedangkan untuk pembiayaan penerimaan daerah tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.39.594.064.985. Total dana yang tersedia untuk tahun 2023 sebesar Rp.873.977.651.676.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2023 menjadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong transformasi ekonomi. Stabilitas ekonomi makro tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi yang secara masif terus dilakukan pada tahun 2020 diyakini dapat membentuk kekebalan komunitas (*herd immunity*) sehingga mempermudah pemerintah dalam mempersiapkan transisi ekonomi nasional.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, menetapkan Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam mencapai visi RPJMN 2020-2024 dituangkan dalam sembilan poin Nawacita yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan

Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arahan presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Penyusunan tema pembangunan RKP tahun 2023 mempertimbangkan arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi COVID-19 dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis 1998. Belajar dari pengalaman tersebut, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Jika upaya pemulih yang dilakukan *business as usual* pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca COVID-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan, hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesign transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesign transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Setelah tahun 2022,

pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6 persen sampai tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada peningkatan produktivitas terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Oleh karena itu, untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari *middle income trap* maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Tema tersebut menekankan pentingnya produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan

pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim yang dapat dilakukan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah dan tingkat pemerintahan, sehingga tema RPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menjewantahkan tema RKP Tahun 2023 disusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang saling memiliki keterkaitan sehingga fokus dalam penanganan dan pemecahan permasalahan pembangunan, antara lain:

1. Arah kebijakan: Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Strategi: Penguatan sistem jaminan sosial, percepatan modernisasi pertanian, peningkatan pemerataan pembangunan.

2. Arah kebijakan: Peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)

Strategi : penguatan sistem kesehatan nasional, peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)

3. Arah kebijakan: Penanggulangan dan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*.

Strategi : Perluasan penyediaan lapangan usaha.

4. Arah kebijakan: Mendorong pemulihan dunia usaha.

Strategi : Percepatan revitalisasi pariwisata, memperkuat UMKM dalam perekonomian nasional.

5. Arah kebijakan: Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Strategi : Percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri, penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan.

6. Arah kebijakan: Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).

Strategi : Mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon, percepatan transisi energi.

7. Arah kebijakan: Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

Strategi : Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi, percepatan pemerataan infrastruktur digital, percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas.

8. Arah kebijakan: Pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Strategi : percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang

tgerkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan serta untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan optimalisasi efektivitas pengendalian sasaran pembangunan jangka menengah.

1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Sasaran PN 1:

- a. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Dalam mewujudkan prioritas nasional 1 disusun 9 (sembilan) major project sebagai langkah konkret pencapaian sasaran pembangunan, antara lain:

- a. Akselerasi pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.
 - b. *Food estate* kawasan sentra produksi pangan.
 - c. Jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan.
 - d. Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng.
 - e. Integrasi pelabuhan perikanan dan *fish market* bertaraf internasional.
 - f. Pengelolaan terpadu UMKM.
 - g. Industri 4.0 di 6 sub sektor prioritas.
 - h. Kawasan industri prioritas dan smelter.
 - i. Destinasi pariwisata prioritas.
2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Sasaran PN 2:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

- b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin (KBI)

Dalam menerapkan prioritas nasional 2 pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan wilayah, didukung 5 kegiatan prioritas, antara lain:

- a. Pengembangan kawasan strategis.

Meliputi kawasan strategis berbasis industri, kawasan strategis berbasis pariwisata.

- b. Pengembangan sektor unggulan.

- c. Pengembangan kawasan perkotaan.

- d. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi.

Kelembagaan dan keuangan daerah.

3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran PN 3:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi

rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.

- c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan angka kematian ibu/AKI, (b) menurunkan angka kematian bayi/AKB, (c) Menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase perokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas, dan (k) harapan lama sekolah.
- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.
- f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah keatas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam daftar *world class university*, (c) proporsi pekerja yang

bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

Dalam menerapkan prioritas nasional 3 meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing disusun 5 (lima) langkah konkret ke dalam major project antara lain:

- a. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
 - b. Pembangunan *science technopark*.
 - c. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
 - d. Reformasi sistem perlindungan sosial.
 - e. Reformasi sistem kesehatan nasional.
4. Prioritas Nasional 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Sasaran PN 4:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan indeks capaian revolusi mental, dan (b) peningkatan indeks aktualisasi nilai-nilai pancasila;
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks pembangunan kebudayaan;
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian indeks pembangunan masyarakat.
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam

kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indeks kerukunan umat beragama;

- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai budaya literasi.

Pencapaian sasaran prioritas nasional 4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan kedalam 4 (empat) program prioritas antara lain:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
 - c. Memperkuat moderasi beragama.
 - d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Sasaran PN 5:

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) menurunnya rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi

yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh jalan lintas utama pulau jam/100 km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur kereta api sesuai standar *track quality index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian on time performance (OTP) transportasi udara;
- c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
- d. Meningkatkan layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kwh/kapita), dan (c) penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (juta ton);
- e. Meningkatnya layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pta lebar (4G).

Dalam mendukung pencapaian sasaran pada PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar maka major project yang rancang antara lain (1) rumah susun perkotaan sebanyak 1 juta unit; (2) akses air minum perpipaan untuk 10 juta sambungan rumah; (3) akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman untuk 90 persen rumah tangga; (11) jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan; (19) transformasi digital.

6. Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sasaran PN 6:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap PDB;
- c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

Pada PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim disusun 2 (dua) *major project* sebagai langkah konkret pencapaian sasaran, antara lain pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3, penguatan sistem peringatan dini bencana.

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran PN 7:

- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;

Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

3.2 Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karakter berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tanggu dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini

adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Mewujudkan Kesejahteraan Petani”** terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatkan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat”** terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **“Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata”** terkait dengan isu strategis dukungan

infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketahanan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan Propinsi Sumatera Barat tahun 2023 selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang termuat pada RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2021-2026 yaitu difokuskan peningkatan produktivitas pada sektor strategis daerah, sehingga tema pembangunan tahun 2023 mengusung tema **“Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi”**. Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata yang diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebesar 5,86 persen, sektor industri pengolahan/manufaktur dengan meningkatkan kontribusi sebesar 12,46 persen serta sektor pariwisata dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,80 persen. Sebagai bentuk penjabaran secara detail prioritas pembangunan dalam mewujudkan

tema peningkatan produktivitas sektor strategis menuju transformasi ekonomi antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing, melalui arah kebijakan:
 - a. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan.
 - b. Percepatan Vaksinasi menuju *Herd Immunity*.
 - c. Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB.
 - d. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial.
 - e. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi.
 - f. Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas.
 - g. Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, melalui arah kebijakan:
 - a. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar).

- b. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan.
 - c. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan.
 - d. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat.
 - e. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
 - f. Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - g. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui arah kebijakan antara lain:
- a. Alokasi anggaran sektor pertanian sebesar 10% dari APBD.
 - b. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan).
 - c. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
 - d. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan,

- e. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam.
 - f. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan.
 - g. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
 - h. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan.
 - i. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
 - j. Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional.
 - k. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, melalui arah kebijakan antara lain:
- a. Penciptaan iklim investasi.
 - b. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.
 - c. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.
 - d. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.

- e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan, melalui arah kebijakan antara lain:
- a. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan.
 - b. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.
 - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata.
 - d. Meningkatkan atraksi seni dan budaya.
 - e. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, melalui arah kebijakan antara lain:
- a. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - b. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan).
 - c. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industri dan pariwisata.
 - d. Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industri melalui efisiensi biaya *logistic*.

- e. Mendukung peningkatan daya saing Kawasan wisata.
 - f. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana.
 - g. Meningkatkan indeks ketahanan daerah.
 - h. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan.
 - i. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - j. Mengurangi luasan Kawasan kumuh.
 - k. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah.
 - l. Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar.
 - m. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat.
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas, melalui arah kebijakan antara lain:
- a. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
 - c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada

substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

- e. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.
- f. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
- g. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- h. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
- i. Peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dirumuskan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah dan telah dirumuskan dalam 10 prioritas pembangunan yang disebut, antara lain:

1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

Prioritas ini diarahkan pada pembangunan pendidikan yaitu peningkatan kualitas dan akses pendidikan dengan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran pendidikan setiap tahunnya. Pembangunan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang meliputi pencapaian tujuan ranah afeksi, kognisi dan psikomotor yaitu pendidikan untuk

mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing. Dengan prioritas ini diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah guru mencukupi, tidak ada yang putus sekolah, kualitas guru meningkat, beasiswa pendidikan perguruan tinggi.

Program prioritas antara lain alokasi belanja pendidikan minimal 20 persen, pembangunan USB dan ruang kelas beserta utilitas lainnya, rehabilitasi sekolah, pembangunan rumah dinas guru, pembangunan asrama dengan disertai kurikulum dan pembangunan karakter, beasiswa miskin dan berprestasi, peningkatan jenjang pendidikan tenaga pendidik PAUD, SD, SMP dari D2, D3 ke jenjang pendidikan S1, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pengembangan muatan lokal, pelaksanaan Kurikulum Merdeka, fasilitasi sertifikasi guru/tenaga pendidik dan

2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)

Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah terutama dalam penanggulangan penyakit/wabah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Capaian dari prioritas ini antara lain meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, alokasi belanja kesehatan minimal 10 persen, perbaikan gizi masyarakat, pola hidup bersih dan sehat diterapkan, penanganan intensif bagi bayi

balita dan ibu melahirkan, pengentasan prevalensi (stunting), *sister hospital*, peningkatan pelayanan puskesmas, pembentukan BLUD RSUD, pembangunan RS Pratama Sikakap, pembangunan puskesmas (Desa Sagulubbeg, Desa Sinaka, Desa Silabu), distribusi tenaga dan alat kesehatan secara proporsional.

3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

Pengembangan jaringan jalan dan transportasi daerah merupakan program pada prioritas ini. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Trans Mentawai dengan spesifikasi dan ruas tertentu dalam mendukung sistem transportasi daerah yang bercirikan kepulauan, pembangunan jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. pembangunan jalan pendukung kawasan strategis daerah, membangun pelabuhan penyeberangan (interkoneksi jalan trans Mentawai), fasilitasi pengembangan jaringan transportasi laut (antar pulau dan Mentawai-Padang), fasilitasi pengembangan Bandara Rokot dan Bandara Peipei, fasilitasi pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet ke semua wilayah Mentawai, pembangunan jaringan irigasi, fasilitasi pembangunan TPA Berkat, pembangunan TPS kecamatan (Sipora Selatan, Sikakap, Siberut Selatan, Siberut Utara) dan penataan kawasan perkotaan dan strategis daerah, revisi RTRT dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)

Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas pemukiman, tersedianya air bersih (Sikabalu, Saibi, Sirilogui, Malakopa), pembangunan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus, penyediaan Bank Tanah, mendorong relokasi pemukiman kumuh dan rawan bencana, membangun drainase untuk pengendalian banjir, pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, peningkatan kualitas kawasan permukiman, mengupayakan Area Penggunaan Lainnya (APL) lebih optimal, melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat.

5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)

Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan agribisnis maupun agroindustri (ekonomi kerakyatan), peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan perikanan dan perluasan pemasaran, Pengembangan Kawasan Strategis (Komoditas Unggulan); Kelapa (Taraet, Siberut Barat Daya), Pisang (Sikabalu, Pagai Selatan), Ikan (Bose), Cengkeh Organik (Saliguma, Sirilogui). Penguatan perdagangan melalui revitalisasi pasar prioritas (Tuapejat, Sipora Selatan, Sikakap, Sikabalu), pengembangan Kawasan Holtikultura (Sikakap, Sipora Utara, Siberut Selatan, Siberut Utara).

6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)

Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan destinasi pariwisata baik dengan skema investasi maupun melalui

pemberdayaan masyarakat untuk kawasan pariwisata prioritas daerah 3M1K (Muntei, Madobag, Mapadegat, Katiet), pembinaan dan pendampingan desa wisata, penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata lokal.

7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausaha muda (enterprenuer), hilirisasi produk pertanian dan perikanan hingga pada akses pasar/pemasaran, Pendampingan UMKM dan IKM (Kelembagaan, Kapasitas SDM, Bisnis Plan/ Proses, Permodalan, Kerjasama Pasar)

8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)

Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai, penguatan kinerja PLTBM, fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN.

9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan seni budaya, pelestarian budaya, mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama, tokoh agama. Tokoh adat/budaya, tokoh masyarakat,

serta pembinaan Masyarakat Hukum Adat, penegakan perda serta penguatan Forkopimda.

10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, menata kembali struktur pemerintah, penerapan sistem merit dalam pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, penuntasan kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas laporan keuangan daerah, penerapan *e-Government*, penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan penguatan inovasi daerah dengan menerapkan setiap OPD minimal 2 Inovasi.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah, 2023

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pembangunan Pertanian Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
			dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
			Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat sosial berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penetapan Birokrasi (Mentawai Prima)

Tabel sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan dengan prioritas pembangunan propinsi, prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah dan prioritas program/ kegiatan dan indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagaimana berikut.

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Skor Indek Ketahanan Pangan		
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Mengurangi daerah rawan pangan		
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang)		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
			Sapi		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan Utilitas Pertanian		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Penyakit Hewan Yang Tertangani		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				KECAMATAN SIPORA UTARA	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				DINAS KESEHATAN	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penegakan PERDA		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PPKS yang diberdayakan		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Persentase PSKS yang terlatih		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PPKS menerima jaminan sosial		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase PSKS yang terlatih		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			

				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Peningkatan Pelayanan non ASN		

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
			Peningkatan Pelayanan Tugas ASN		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				DINAS PERHUBUNGAN	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Peningkatan Pelayanan non ASN		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
			Peningkatan Pelayanan Tugas ASN		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Bina Kelompok tani yang produktif		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			konsistensi program RPJMD Kedalam RKPD		

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				KECAMATAN SIPORA UTARA	
			Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		
				KECAMATAN PAGAI SELATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	
			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		
				KECAMATAN PAGAI SELATAN	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu		
				KECAMATAN PAGAI SELATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase ormas aktif		

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase OPD dengan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Jumlah Pencanaan kecamatan layak anak		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Cakupan Jaringan Irigasi		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Rasio Kepatuhan IMB		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase Jalan Mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Rasiotenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertiiikat kompetensi/		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Ketaatan Terhadap RTRW		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			persentase lingkungan permukiman kumuh		

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase armada angkutan laut jalan/layar		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		
				KECAMATAN SIBERUT TENGAH	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		
				KECAMATAN SIBERUT TENGAH	
			Persentase Kepatuhan Teknis Peraturan Perizinan		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		
				KECAMATAN SIBERUT TENGAH	
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	
			Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Forum Pembangunan		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		
			KECAMATAN SIBERUT TENGAH		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		
			KECAMATAN SIBERUT TENGAH		
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Bencana tertangani		
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
			Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan Tupoksi		
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
			SEKRETARIAT DAERAH		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah		
			SEKRETARIAT DAERAH		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			konsistensi program RPJMD Kedalam RKP		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				INSPEKTORAT	
				KECAMATAN SIBERUT SELATAN	
			Persentase Kebutuhan Paket yang Tersedia		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	
			Persentase Kebutuhan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang Tersedia		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Barat		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	

TABEL 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Perayaan HUT RI			
				KECAMATAN SIBERUT BARAT		
			Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan			
				KECAMATAN SIBERUT BARAT		

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
90	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK PAUD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.830.849.000
			APK SD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.104.248.230
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	949.494.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				DINAS KESEHATAN	30.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)		
				DINAS KESEHATAN	1.900.000.000
			Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah		
				DINAS KESEHATAN	4.055.830.840

				DINAS KESEHATAN	18.918.522.456
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.996.000
			Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.212.042.000

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29.997.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PPKS yang diberdayakan		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			

				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	35.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			

				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	135.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.364.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000
			Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			

				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	400.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah		

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.000.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	427.511.888

				KECAMATAN SIBERUT UTARA	79.810.000
				KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	190.431.000
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				KECAMATAN SIBERUT SELATAN	68.806.410
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

				KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	6.191.250
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	13.821.000
92	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah				
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Jumlah Pencanaan kecamatan layak anak		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	63.414.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	19.999.900
97	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			

				DINAS PERIKANAN	399.999.760
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikanan yang produktif		
				DINAS PERIKANAN	157.022.200
101	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	50.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

				KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	24.999.800
102	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	700.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Cakupan Jaringan Irigasi		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.749.150.000

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.749.150.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase Jalan Mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.636.060.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Ketaatan Terhadap RTRW		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.150.938.860
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			persentase kawasan permukiman yang tertata		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	78.553.000
			persentase lingkungan permukiman kumuh		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.413.858.000

				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	99.999.900
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			persentase kawasan permukiman yang tertata		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.147.500.000
			Persentase lingkungan permukiman kumuh		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	58.613.000

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			
				DINAS PERHUBUNGAN	70.474.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Persentase armada angkutan laut jalan/layar			
				DINAS PERHUBUNGAN	55.260.336	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah			
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	900.000.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				KECAMATAN SIBERUT UTARA	3.504.200.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan			
				KECAMATAN SIPORA UTARA	22.728.000	
104	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.193.290.000	
			persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah			
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	640.338.000	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	623.216.000	

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase kejadian kebakaran yang tertangani		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	385.490.000

				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	124.065.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.088.500
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	193.639.800
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	219.999.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				DINAS PERHUBUNGAN	4.902.850.200
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.029.100.000
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	39.000.000
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi		

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	324.439.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	402.550.000
				SEKRETARIAT DAERAH	607.025.600
			Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		
				SEKRETARIAT DPRD	49.960.000

				SEKRETARIAT DPRD	4.900.762.811
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

				SEKRETARIAT DPRD	309.150.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	125.272.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	115.959.552.833
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	48.012.800
				INSPEKTORAT	472.549.600

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6

				KECAMATAN SIBERUT UTARA	2.543.869.067
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	195.120.000
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	74.280.400
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	74.280.400
				KECAMATAN SIBERUT SELATAN	226.565.000
				KECAMATAN SIPORA UTARA	28.650.000
			Persentase Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Perizinan		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	13.196.000
			Persentase Kebutuhan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang Tersedia		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	19.932.000
			Persentase Kelancaran Pelayanan Publik		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	286.240.000
			Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		
				KECAMATAN PAGAI SELATAN	1.910.644.230
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara		
				KECAMATAN SIPORA UTARA	25.000.000
			Persentase Kepatuhan Teknis Peraturan Perizinan		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	20.000.000

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan		
				KECAMATAN SIBERUT SELATAN	26.410.000
			Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Forum Pembangunan		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	49.999.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

				KECAMATAN SIBERUT UTARA	51.024.000
			Perayaan HUT RI		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	55.361.000
			Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan		
				KECAMATAN SIBERUT BARAT	55.361.000
				KECAMATAN SIBERUT SELATAN	58.830.000
				KECAMATAN SIPORA UTARA	79.999.900
			Persentase Nilai-Nilai Bhinnekam Tunggal Ika		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	58.999.800
			Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		
				KECAMATAN PAGAI SELATAN	50.000.000

				KECAMATAN SIKAKAP	29.999.200
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

				KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	18.829.200

TABEL 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu		
				KECAMATAN SIBERUT SELATAN	51.030.000
			Persentase Penataan Dokumen Aset di Tk.Kecamatan		
				KECAMATAN SIPORA SELATAN	29.999.800

				KECAMATAN SIKAKAP	29.998.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
				KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	226.800.000

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)						
		Meningkatnya Budaya Literasi					
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.000.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	416.193.143.343		
				INSPEKTORAT	32.250.000		
		Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			APK PAUD				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.661.698.000		
			APK SD				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	63.744.567.092		
			APK SMP				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	42.046.351.888		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.898.989.800		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	299.999.800		

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	298.987.200		
				Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	298.987.200		
				Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	298.987.200		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	286.035.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	24.357.500		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	31.925.500		
2	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)							
		Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)				
					DINAS KESEHATAN	18.773.726.400		
				Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS KESEHATAN	48.452.773.020		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Jumlah Puskesmas Terakreditasi				
					DINAS KESEHATAN	330.000.000		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Rata-rata lama pasien dirawat				
					DINAS KESEHATAN	300.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Jumlah desa dengan PHBS				
					DINAS KESEHATAN	375.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah				
					DINAS KESEHATAN	175.303.388.418		

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

					DINAS KESEHATAN	18.918.522.456		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	73.795.500		
3	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)							
		Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana						

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase Bencana tertangani				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.097.334.800		
			Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan					
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.000.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	160.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu				
					KECAMATAN SIPORA UTARA	180.000.000		
			Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.202.029.800		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	340.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	607.227.047		
		Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika						
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.282.378.340		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.499.999.800		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.558.842.439		
					DINAS PERHUBUNGAN	34.738.455.390		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.847.843.371		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
				Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.349.999.700		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					KECAMATAN SIPORA UTARA	2.216.990.340		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan				
					KECAMATAN SIPORA UTARA	141.984.000		
		Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah						
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Rasio Kepatuhan IMB				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.099.686.200		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Ketaatan Terhadap RTRW				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.621.678.520		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase armada angkutan laut jalan/layar				
					DINAS PERHUBUNGAN	915.067.036		
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Jumlah barang melalui dermaga/pelabuhan per tahun				
					DINAS PERHUBUNGAN	7.830.978.700		
				Jumlah Orang melalui dermaga/pelabuhan pertahun				
					DINAS PERHUBUNGAN	7.830.978.700		
		Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan Jaringan Irigasi			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.501.020.000	
				Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.501.020.000	

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase Jalan Mantap			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36.300.747.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Rasiotena operator/teknisi/analisis yang memiliki sertiiikat kompetensi/			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	157.340.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	49.769.500	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	6.191.250	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Forum Pembangunan			
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	29.999.800	
4	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)						

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana					
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
			Persentase kejadian kebakaran yang tertangani				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		385.490.000	
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
			persentase kawasan permukiman yang tertata				
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		78.553.000	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
			Persentase lingkungan pemukiman kumuh				
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		150.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
			persentase sampah yang dikelola				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		270.253.900	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan				
				KECAMATAN SIBERUT BARAT		41.463.000	
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan					
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase Pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	600.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tidak lanjuti					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	116.631.000		

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah					
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.236.278.799		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
			persentase lingkungan permukiman kumuh					
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.593.273.000		

					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	99.999.900		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
			persentase kawasan permukiman yang tertata					
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.347.208.400		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
			persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman					
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	856.683.000		

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika				
				KECAMATAN SIPORA SELATAN		19.999.900		
6	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)							
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah				
				DINAS PERIKANAN		19.961.255.607		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		150.000.000		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		719.999.100		
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil				
				DINAS PERIKANAN		37.771.258.700		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Produksi perikanan kelompok nelayan budidaya				
				DINAS PERIKANAN		1.099.999.400		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif			
					DINAS PERIKANAN	464.044.400	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Babi				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.710.306.000	
			Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang)				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.403.200.000	
			Sapi				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.230.577.800	
			Unggas				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.710.306.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan Utilitas Pertanian				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	400.000.000	
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lain per hektar				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	199.999.600	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Penyakit Hewan Yang Tertangani				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	300.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
			persentase bencana pertanian yang tertangani				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	199.999.600	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Bina Kelompok tani yang produktif			
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	399.996.400	

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				

					DINAS PERIKANAN	399.999.760	
7	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)						
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel					
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	629.998.800	

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				

					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	400.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				

					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	199.999.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	506.310.500	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	

					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.433.399.000		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					

					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	99.999.850		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					

					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	420.704.200		
8	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)							
		Meningkatnya Kesempatan Kerja						
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	439.999.800		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	400.000.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.078.457.800		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase realisasi investasi			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	786.372.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	748.878.400	
		Meningkatnya keterampilan hidup (life skill) sumber daya manusia					
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
				Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	193.639.800	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	594.422.450	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Persentase koperasi sehat			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200.000.000	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	403.131.000	

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					TERPADU SATU PINTU		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.893.145.843	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.944.553.627	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.207.650.000	
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	797.233.600	

		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.994.999.800	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Meningkatnya Pengembangan Industri				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN	1.190.789.000	

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
9	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)						
		Meningkatnya Budaya Literasi					
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		299.994.450	
		Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan					
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku			
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		940.200.000	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Nilai Sistem Merit			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		10.038.402.800	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		14.302.946.400	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		2.078.324.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Kapabilitas APIP			

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					INSPEKTORAT	11.547.396.800	
				Persentase tindak lanjut temuan			
					INSPEKTORAT	11.547.396.800	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu				
					KECAMATAN SIBERUT SELATAN	340.640.000	
					KECAMATAN PAGAI SELATAN	596.880.000	
		Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender					
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Penegakan PERDA				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	349.261.600	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan				
					KECAMATAN SIBERUT BARAT	147.036.000	
					KECAMATAN SIBERUT SELATAN	181.940.000	
					KECAMATAN SIPORA UTARA	227.439.800	
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			persentase sampah yang dikelola				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1.005.143.626	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Barat				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN SIBERUT BARAT	103.924.000	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan		
					KECAMATAN SIBERUT SELATAN	145.660.000	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara		
					KECAMATAN SIPORA UTARA	106.000.000	
					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	207.630.000	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	13.265.162.487	
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	744.000.000	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	15.913.079.955	
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.559.569.236	
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	668.981.550	
					SEKRETARIAT DAERAH	94.158.032.493	
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
					Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah		
					SEKRETARIAT DAERAH	1.698.377.400	
					Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah		
					SEKRETARIAT DAERAH	41.054.626.200	
					Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi		
					SEKRETARIAT DAERAH	4.596.350.400	
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen			
					SEKRETARIAT DAERAH	2.170.545.750	
				Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu			
					SEKRETARIAT DAERAH	3.450.670.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.812.885.700	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	671.935.200	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.350.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	9.845.326.068	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	351.073.386.099	
				Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	3.417.387.000	

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	7.643.747.700	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	1.256.206.650	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Persentase PAD terhadap total pendapatan			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	4.718.716.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.194.225.505	
					INSPEKTORAT	18.321.637.221	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP			
					INSPEKTORAT	2.095.881.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			
					KECAMATAN SIBERUT BARAT	222.841.200	
					KECAMATAN SIBERUT SELATAN	8.684.090.859	
					KECAMATAN SIPORA UTARA	5.726.193.660	
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	300.000.000	
					KECAMATAN PAGAI SELATAN	865.820.100	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan			
					KECAMATAN SIBERUT BARAT	141.570.000	
					KECAMATAN SIBERUT SELATAN	153.084.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			
					KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.260.071.079	
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya					
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
			Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	154.473.000	
		Terkendalnya Inflasi Daerah					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti			
					SEKRETARIAT DAERAH	2.414.441.800	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.202.325.971	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				

					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	124.065.000	

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Peningkatan Pelayanan non ASN				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.343.788.898		
				Peningkatan Pelayanan Tugas ASN				
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.343.788.898		

					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	83.950.000		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.668.010.648		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	544.615.000		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	361.268.100		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	363.052.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	153.984.000		

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.138.655.236		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	748.121.900		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	716.878.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	392.112.800		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.264.132.550		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Peningkatan Pelayanan non ASN				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.460.119.000	
				Peningkatan Pelayanan Tugas ASN			
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.460.119.000	
				Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah			
					SEKRETARIAT DPRD	920.134.127	

					SEKRETARIAT DPRD	15.450.547.811	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				

					SEKRETARIAT DPRD	14.135.800.000	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				konsistensi program RPJMD Kedalam RKPD			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.369.541.200	
				Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	378.278.200	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				

					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	275.218.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					KECAMATAN SIBERUT UTARA	3.114.358.367	

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan			
					KECAMATAN SIBERUT TENGAH	2.206.221.372	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					KECAMATAN SIBERUT BARAT	1.927.849.135	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					KECAMATAN SIBERUT BARAT	74.280.400	

					KECAMATAN SIBERUT BARAT	75.000.000	
					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	1.949.371.979	
				Persentase Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Perizinan			
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	23.195.000	
				Persentase Kebutuhan Paket yang Tersedia			
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	79.987.100	
				Persentase Kebutuhan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang Tersedia			
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	19.932.000	
				Persentase Kelancaran Pelayanan Publik			
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	310.240.000	
				Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah			
					KECAMATAN PAGAI SELATAN	1.884.467.530	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

					KECAMATAN SIBERUT UTARA	7.200.000	
				Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan			

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN SIBERUT TENGAH	23.930.000	
					Persentase Kepatuhan Teknis Peraturan Perizinan		
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	20.000.000	

					KECAMATAN SIKAKAP	19.995.550	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		

					KECAMATAN SIBERUT UTARA	59.708.200	
					Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		
					KECAMATAN SIBERUT TENGAH	39.974.000	

					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	24.731.250	
					Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Forum Pembangunan		
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	49.999.800	
					Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		
					KECAMATAN PAGAI SELATAN	41.332.000	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		

					KECAMATAN SIBERUT UTARA	23.974.000	
					Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		
					KECAMATAN SIBERUT TENGAH	18.827.500	
					Perayaan HUT RI		
					KECAMATAN SIBERUT BARAT	73.518.000	

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	24.999.800	
					Persentase Nilai-Nilai Bhinnekam Tunggal Ika		
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	58.999.800	
					Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		
					KECAMATAN PAGAI SELATAN	50.643.000	

					KECAMATAN SIKAKAP	29.999.200	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		

					KECAMATAN SIBERUT UTARA	40.680.000	
					Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		
					KECAMATAN SIBERUT TENGAH	90.634.750	
					Indeks Kepuasan Masyarakat		
					KECAMATAN SIBERUT BARAT	73.355.000	

					KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	18.829.200	
					Persentase Penataan Dokumen Aset di Tk.Kecamatan		
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	29.999.800	
10	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)						
		Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender					
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu			

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.201.751.600		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase ormas aktif				
					KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	102.397.200		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA				
					KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	672.027.600		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase konflik sosial tertangani				
					KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	946.542.000		
			Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	405.211.200		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Jumlah sanggar yang dibina				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150.000.000		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.182.872.728	
				Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan Tupoksi			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.620.354.932	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase PPKS yang diberdayakan			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000	
				Persentase PSKS yang terlatih			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200.000.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	794.300.100	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase PPKS menerima jaminan sosial			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	54.950.900	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Panyaluran Bantuan Tepat Sasaran			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.000.000	
				Persentase PSKS yang terlatih			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	15.000.000	

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DAN PERLINDUNGAN ANAK			
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase OPD dengan perencanaan dan penganggaran yang reponsiv gender				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	122.755.000		
				Persentase OPD dengan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	78.949.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	124.684.000		

					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	35.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Selarasnya data base gender dan anak dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender pada OPD				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.593.000		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Jumlah Pencanaan kecamatan layak anak				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	192.703.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan				

TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	236.783.100		

					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	135.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Kepatuhan Teknis Peraturan Perizinan				
					KECAMATAN SIPORA SELATAN	34.999.800		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrai Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1208 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
							1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 orang	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 paket	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
							1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										an Mentawai	
						1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Kendaraan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	100 persen	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	100 persen	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (SD Fransiskus Simatalu)	0 Unit 1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Dibangun (SDN 09 Makalo) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (SDN 04 Muara Sikabalan)	1 Ruang 1 Ruang		Semua Kab/Kota	
						1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang			
						1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun (SDN 29 Simatalu, SDN 17 Simatalu, SDN 26 Simalegi, SDN Matotonan)	4 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			an Mentawai	
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (SDN 26 Tuapejat, SDN 11 Tuapejat)	8 ruang	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		
							1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit		
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	8 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13000 Peserta Didik	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	13000 peserta didik	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	400 Guru		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah yang mengikuti pengembangan karir	50 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	134 Satuan Pendidikan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	134 Satuan Pendidikan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	8 Ruang		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	100 Persen	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
						1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang akan Dibangun	2 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (SMPN 2 Siberut Barat)	10 paket	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6000 Peserta Didik	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6000 Peserta Didik	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	34 Satuan Pendidikan	Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pertama			Mentawai	
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	34 Satuan Pendidikan	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	60 Persen		1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit		
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit		
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	20 Satuan Pendidikan	Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
						1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	70 Satuan Pendidikan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Kesetaraan	100 persen	1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	11 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik 4 lembaga		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan		Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	2 persen	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	25 Persen	1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi Persentase tenaga	100 persen 17 persen 90 persen	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,	500 Dokumen	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1		Nonformal/Kesetaraan	PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan						
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan 389 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 657 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi	0 Paket 7 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Mentawai	
						1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Keti.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Sub Kegiatan	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan	70 persen	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10 Sub Kegiatan	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	KESEHATAN MASYARAKAT	daerah		Daerah Kabupaten/Kota							
						1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Pustu Saureinu dan Pustu Pukarayat)	2 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit 2 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket 1 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 Paket 15 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit 10 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 SubKegiatan	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2853 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Sub Kegiatan						
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk	28 Sub Kegiatan						

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2724 Orang			Kab. Kepulauan Mentawai	
					1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2724 Orang			Kab. Kepulauan Mentawai	
					1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9922 Orang			Kab. Kepulauan Mentawai	
					1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11036 Orang			Kab. Kepulauan Mentawai	
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65963 Orang			Kab. Kepulauan Mentawai	
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5737 Orang			Kab. Kepulauan Mentawai	
					1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5551 Orang			Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										ai	
						1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	567 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	575 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	10 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Hibah PMI (200)	0 Dokumen 2 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Kabupaten/Kota Sehat				an Mentawai	
						1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen 1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit 5 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2 Sub Kegiatan							
						1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	5 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang diterbitkan Jumlah Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang diterbitkan Tersedianya Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan	1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai		
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya						
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rata-rata lama pasien dirawat	5 Hari	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<p>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>1 Sub Kegiatan</p>	<p>1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p>	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai		
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<p>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> <p>1 Sub Kegiatan</p>	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa dengan PHBS	20 Desa	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Persen	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen		1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										an Mentawai	
						1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 Persen	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan	100 Persen	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100 Persen	1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 Persen	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi	23 HA	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, erosi, dan ekresi yang terlindungi	2 Km	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
		Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,30 Persen				1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.03.02.2.01.12 Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	1 KM	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.03.02.2.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	108 meter	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.03.02.2.01.33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	84 meter	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										ai	
						1.03.02.2.01.43 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	Panjang Seawall dan Bangunan Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	1 KM		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten 49.31 Persen		1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.45 KM		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3.5 KM		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.414 KM		Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak 45 persen	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Meningkatnya SR Penuna Air Bersih 1800 SR		1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4.214286 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	MINUM			Kabupaten/Kota							
						1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimisasi SPAM	2 Dokum		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	3 Liter/Detik		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	139 SR		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	200 SR		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	50 persen	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya acuan pendukung pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	1 Dokumen	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan	30 persen	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Persentase Rumah tangga yang memiliki tangki septik	15 Persen	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	LIMBAH	sistem pengelolaan air limbah		Daerah Kabupaten/Kota							
						1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	18 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Berkurangnya titik genangan air	70 persen	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Drainase sesuai kebutuhan	0 Meter	1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	300 M		Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	75 Persen	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah IMB yang diterbitkan	2 Dokumen	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.0335714286 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
							Luas Gedung yang terbangun	273.910758 M2			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	2 Unit		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Kawasan Strategis Yang Ditata bangunan dan Lingkungan	1 Kawasan	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia acuan kawasan penataan bangunan dan lingkungannya	2 Dokumen	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	10 Persen	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten	5.48 Km	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	15 Dokumen		
							1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	6.89 KM		
							1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1.34 KM		
							1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	4 KM	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	27.11 KM		
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	52 M	Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										an Mentawai	
						1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	117.5 M			
						1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0.15 KM			
						1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9 Dokumen			
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasiotenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertiiakat kompetensi/	3 Perse	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya ketersediaan tenaga terampil konstruksi	200 Orang	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	60 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	100 Persen	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RTRR Kabupaten yang ditetapkan dan disosialisasikan	3 Dokumen	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.03.12.2.02	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah		Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	2 Dokumen	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah	4 Dokumen	1.03.12.2.04.03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	2 Kasus		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Kegiatan	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.04.01.2.02 Administrasi	terlaksananya kegiatan	2 Jenis	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	25 Orang/bulan	Semua Kab/Kota	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Keuangan Perangkat Daerah	administrasi keuangan			dan Tunjangan ASN			a Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
			1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan barang milik daerah	1 Kegiatan	1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai		
			1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Kegiatan	1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai		
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Terlaksananya pemeliharaan barang	4 Kegiatan	1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	Semua Kab/Kota Kab.		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya			Kepulauan Mentawai	
						1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 Orang 20 Orang			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.04.02.2.02.02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	20 Orang			
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencaa atau relokasi program kabupaten/kota	1 Kegiatan	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0 Unit Rumah	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	46 Unit Rumah	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	50 Unit Rumah			
			1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen			
			1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan	Persentase lingkungan permukiman kumuh	30 persen	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Pengembangan Perumahan			Pengembangan Perumahan					
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	55 persen	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	600 unit	1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya kegiatan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	2 Kegiatan	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen			
						1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	1 dokumen	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	0 Dokumen	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	70 persen	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan	1 Kegiatan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	5 Lokasi	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen		Semua Kab/Kota	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
					Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	28 orang		Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	28 Orang/bulan		
							1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
								Terbayarkannya Honorarium Pengelola Keuangan dan BMD	7 orang		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	12 Bulan	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
					Terlaksananya administrasi umum perkantoran	75 Jenis		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 jenis		
							1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai
						1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai
						1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan			Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi SKPD ke luar daerah	20 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai
						1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 paket			Kab. Kepulauan Mentawai

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Keti.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	1 Tahun 2 Jenis	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarkannya tagihan telepon, listrik, dan ijin radio	3 rekening 3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terbayarkannya gaji dan bakasi pegawai kontrak	1 Tahun 62 orang	Kab. Kepulauan Mentawai		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan jabatan	1 Tahun 15 unit	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit 2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit 16 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin yang diservice	10 Unit 7 unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kepulauan		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			an Mentawai	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	85 Persen	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya suasana aman dan tentram bagi masyarakat	43 persen	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2 Kasus	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Kasus	Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PPNS	2 orang	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatnya pengetahuan aparatur	2 orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Bencana tertangani	100 persen	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	2 jenis	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	80 Orang		
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Jenis	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang		
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian	12 Dokumen		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
						1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Telaksananya pelatihan jitu pasna	100 Orang			
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6 Jenis	1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan			
						1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang			
						1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang			
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 persen	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan pencegahan kebaran dari bahan bahaya dan beracun	20 persen	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen			
						1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket	2 Laporan	Kab. Kepulauan		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		an Mentawai	
						1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	14 Orang			
			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah alat proteksi kebakaran	180 Tabung	1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran			1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya kepedulian keikutsertaan masyarakat dalam mencegah	20 persen	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	20 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				bahaya kebakaran							
						1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan		Kab. Kepulauan Mentawai	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan Tupoksi	100 %	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Anjab ABK	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab.	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Kepulauan Mentawai	
						1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 %	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan	80 %	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Urusan Pemerintahan Daerah	baik		atau Kendaraan Dinas Jabatan				an Mentawai	
						1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang diberdayakan	39.2 %	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase PPKS yang diberdayakan	100 KK	1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Keluarga	Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dilatih	137 Orang/lembaga	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota		an Mentawai	
						1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	100 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan	430 orang	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
						1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS menerima jaminan sosial	82.39 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang valid	100 %	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	200 Keluarga	Kab. Kepulauan Mentawai	
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5006 Keluarga	Kab. Kepulauan Mentawai	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Panyaluran Bantuan Tepat Sasaran	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana mendapatkan bantuan	20 orang	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang diberdayakan	20 orang	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80 persen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja makro dan rencana Tenaga kerja mikro yang ditetapkan	1 dokumen	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	20 persen	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan	60 persen	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	60 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya rutin kantor BLK Mini	20 jenis	Kab. Kepulauan Mentawai		
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	40 persen	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	40 persen	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	30 dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dengan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender	20 Persen	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelembagaan PUG	18 OPD	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	1 Dokumen	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	dibidang politik, hukum, dan sosial Jumlah organisasi yang mendapatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3 Organisasi						
						2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi		Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (IKE) Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	3 Lembaga 3 Lembaga	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 Kegiatan	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		terpadu										
						2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah		Kab. Kepulauan Mentawai		
			2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	1 Layanan	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan		Kab. Kepulauan Mentawai		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Selarasnya data base gender dan anak dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender pada OPD	26 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data anak dan gender yang dianalisis	1 Dokumen	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Pencanangan kecamatan layak anak	3 Kecamatan	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan pelmbagaan PHA	4 Lembaga	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan pelmbagaan PHA	2 Lembaga	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai		
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Kegiatan	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1 Layanan	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus penguatan dan pengembangan tingkat daerah	2 Lembaga	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan non ASN Peningkatan Pelayanan Tugas ASN	105 Orang 89 Orang	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	13 bulan	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Administrasi Keuangan	89 Orang/bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi pelayanan perangkat daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan 0 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	12 bulan	2.09.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya mobil dinas dan sepeda motor	6 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 parsen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	1 paket	2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Balai Benih Utama (BBU) Terpeliharanya gedung kantor	4 Unit 1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0 Unit			
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN	Skor Indeks	50 persen	2.09.03.2.01 Penyediaan dan	Meningkatnya	58 persen	2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang	1 Laporan	Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketahanan Pangan		Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Cadangan Pangan Masyarakat		Lokal	Tersedia		an Mentawai	
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan	1 paket	2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	tersedianya peta skor PPH,NBM dan FSVA	3 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Mengurangi daerah rawan pangan	3 lokasi	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbantunya masyarakat dengan pelayanan Urusan pemberian Sarana Pertanian	3 lokasi	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	32 Orang	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	79 Paket	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Menunjang Urusan Pemerintahan	1 Jenis	2.11.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						2.11.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Laporan	2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kot a Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Laporan	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Semua Kab/Kot a Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit	Semua		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Peralatan dan Mesin Lainnya	Dipelihara			Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8 Unit yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	100 persen	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS Kabupaten	1 Dokumen	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	100 persen	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	2 Dokumen	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen		
							2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	0 Dokumen		
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	2 Dokumen	2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	0 Titik		
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM			2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman			2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25610 Ha		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	AN HAYATI (KEHATI)			Hayati Kabupaten/Kota							
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0 Dokumen		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak lanjuti	100 persen	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1 Laporan	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	5 MHA	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5 MHA	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	6 Dokumen		
				2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait	5 MHA	2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	6 Dokumen		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	dengan PPLH							
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase sampah yang dikelola	7 persen	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	36 Ton	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen		
							2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	36 Ton		
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok		
							2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen		
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 Unit		
				2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	4 Lokasi	2.11.11.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	2.12.01 PROGRAM			2.12.01.2.01			2.12.01.2.01.01 Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	0 Dokumen	Semua	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen		Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.12.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5000 Dokumen			
						2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan			
			2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	43 Laporan			
			2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	5000 Dokumen			
						2.12.02.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	1 Laporan			
								0 Laporan			
								0 Laporan			
								0 Orang			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terkait Pendaftaran Penduduk			
			2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	43 Layanan		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen		
						2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Laporan		
			2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan		
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan			2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
								Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		
						2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen		
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
							2.13.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
							2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 jenis	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
							2.13.01.2.06.05 Penyediaan			Semua	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Barang Cetak dan Penggandaan				Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	80 eksemplar		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.13.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			
						2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.13.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.13.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										ai	
						2.13.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.13.01.2.13 Penataan Organisasi			2.13.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Tata Laksana				Mentawai	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa		2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0 Desa			
						2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 Desa			
						2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangannya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	43 Desa			
						2.13.02.2.01.04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0 Desa			
						2.13.02.2.01.05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan			
						2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0 Unit			
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0 Dokumen			
						2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen			
						2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen			
						2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	43 Dokumen			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	86 Orang			
						2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 Laporan			
						2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	43 Dokumen			
						2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	43 Dokumen			
						2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan			
						2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan			
						2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen			
						2.13.04.2.01.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	92 Dokumen			
						2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	92 Orang			
						2.13.04.2.01.15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	12 Desa			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		
							2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga		
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan		
							2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		
							2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.13.05.2.01.11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga			
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen			
						2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
						2.14.02.2.01.03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen			
						2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Dokumen			
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Laporan			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan			
						2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan			
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen			
						2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen			
						2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen			
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi			
						2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	43 Dokumen			
						2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan	5 Unit			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		
							2.14.03.2.01.05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media edukasi	4 jenis		
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan		
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi		
							2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							PKB/PLKB				
							2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	43 Laporan		
							2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	30 Orang		
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan		
							2.14.03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Orang		
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0 Orang		
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Unit		
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	0 Laporan		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jaringan dan Jejaringnya	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
							2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	0 Orang		
							2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0 Orang		
							2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0 Laporan		
							2.14.03.2.03.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	0 Orang		
							2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	0 Orang		
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0 Organisasi		
							2.14.03.2.04.02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 Dokumen		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
						2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	0 Kampung			
						2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	0 Laporan			
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	0 Kelompok			
						2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Unit			
						2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan			
						2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Orang			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
							2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Orang		
							2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Kelompok		
							2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan		
							2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0 Laporan		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas	100 Persen	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tesusnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	perangkat daerah										
						2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Adm. Keuangan	2 Sub Kegiatan	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	3 Kantor	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		Semua Kab/Kota	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Penggandaan				a Kab. Kepulau an Mentaw ai	
						2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas	1 unit	2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang disediakan	15 unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	63 ASN	2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai		
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya operasional perkantoran	1 tahun	2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		
							jumlah kendaraan roda 2	8 unit			
						2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase armada angkutan laut jalan/layar	85 Persen	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Analisis Penyusunan Rencana Induk	3 Dokumen	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya rambu-rambu petunjuk jalan	100 unit	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	100 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit		
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	Semua Kab/Kota	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Adanya prasarana fasilitas perhubungan	1 Dokumen	2.15.02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia	100 persen	2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	Semua Kab/Kota		
						2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	Semua Kab/Kota		
						2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Semua Kab/Kota		
			2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rencana umum trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 dokumen	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
			2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya peraturan tentang rencana tentang izin angkutan	1 laporan	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
			2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Tersedianya peraturan tentang izin angkutan	1 laporan	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Kabupaten/Kota								
			2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya peraturan tentang tarif kelas ekonomi	1 laporan	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Semua Kab/Kota		
						2.15.02.2.16.03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan			
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang melalui dermaga/pelabuhan per tahun Jumlah Orang melalui dermaga/pelabuhan pertahun	702302 ton 319272 Orang	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lancarnya transportasi angkutan laut	1 laporan	2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
			2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya pelayanan dinas perhubungan	1 Dokumen	2.15.03.2.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
			2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Terlaksananya pengawasan pelabuhan	0 laporan	2.15.03.2.13.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0 Laporan	Semua Kab/Kota		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Pelabuhan Sungai dan Danau									
						2.15.03.2.13.07 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	0 Unit		Semua Kab/Kota		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	10 Dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Dokumen 0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum	100 Persen	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Perangkat Daerah						an Mentawai	
						2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	6 Jenis	2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Keti.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	100 Persen	2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai		
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
						2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya 1 gedung yang dipelihara atau direhabilitasi		Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	5 Persen	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	65 Persen	2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (HIBAH PWI /150)	3 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	70 Persen	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Yang Dikelola	3 Domain	2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	36 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks SPBE	2 indeks	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan	Jumlah Perangkat Daerah yang	36 Perangkat	Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
						Informasi Elektronik	Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Daerah		an Mentawai		
						2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai		
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen				
						2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	0 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	23 orang	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							terbayarnya honorarium ASN	7 orang				

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terhadirinya rapat skpd terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 buah 12 buah	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen alat listrik	8 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Logistik Kantor (ATK, Makanan, Minum Rapat, Natura dan Pakan Natura)	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis dan jumlah yang dicetak dan digandakan	13 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah menghadiri undangan rakor luar daerah	14 kali	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
			2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpeliharanya kendaraan dinas	11 unit	2.17.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa pelayanan Kantor	55 Persen	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik dan TV Berlangganan	4 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	50 Persen	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 jenis		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	50 persen	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Yang Sehat	52 Persen	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	20 koperasi 0 Unit Usaha		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi sehat	10 Persen	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Jumlah pengurus/pengawas/anggota yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	86 Persen	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	meningkatnya kualitas sdm usaha mikro	150 orang	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			dalam Daerah Kabupaten/Kota								
			2.17.05.2.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.17.05.2.02.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	jumlah anggota koperasi dan UMKM yang mendapatkan diklat perkoperasian 150 orang jumlah anggota koperasi yang difasilitasi pengembangan jasa pertanian dan aneka jasa 50 orang				
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi 2 persen	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang sehat 30 Persen		2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelompok usaha bidang pertanian, perikanan dan pariwisata yang mendapatkan penyuluhan koperasi 5 kelompok jumlah koperasi yang difasilitasi perubahan akta koperasinya 10 kecamatan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Unit Usaha koperasi pengelola pasar rakyat yang mendapatkan pendampingan manajemen 1 koperasi tersedianya jumlah ranperda tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan umkm 1 dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai		
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 5 persen	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Bina Kelompok UKM Produktif (Modal diatas Rp. 50Jt) 5 Persen		2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	terlaksananya pendataan UMKM 3 kecamatan		Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	tersedianya data UMKM yang memenuhi syarat SIKP	120 umkm		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro meningkatnya jumlah Produk UMKM yang memiliki merek dan sertifikat halal	0 Unit Usaha 25 umkm			
						2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	adanya dokumen usaha mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	120 UMKM 0 Orang			
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	85 Persen	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Usulan Pokok Pikiran DPRD Kab Kepulauan Mentawai	22 Orang	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Usulan Pokok Pikiran DPRD Kab. Kepulauan Mentawai	22 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100 persen	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumberdaya manusia terlatih	100 persen	2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 stel	Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	6 kali	Kab. Kepulauan Mentawai		
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 persen	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100 persen	2.18.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.18.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			
						2.18.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening	Semua Kab/Kot a Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 orang	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100 persen	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Semua Kab/Kot a Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 jenis	Semua Kab/Kot a Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						2.18.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	Persentase Kesesuaian	80 persen	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian	Tersedianya peta potensi investasi	80 persen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	1 Dokumen	Kab. Kepulau an	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PENANAMAN MODAL	Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kab/kota		Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal			Mentawai	
			2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi kab/kota	1 dokumen	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	85 Persen	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu	5 kecamatan	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Kecamatan	Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	2 persen	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi investasi kab/kota	50 persen	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 Kegiatan Usaha.		
						2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10 Pelaku Usaha		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2.19.02.2.01 Penyiapan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan penataan lapangan bola kaki muntei dan maileppet	2 Dokumen		
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terbayarnya hibah untuk organisasi kepemudaan (KONI dan Pramuka)	2 Organisasi	Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							Terfasilitasinya tournament olahraga tradisional/rekreasi (Laju Sampan)	1 Paket			
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90 Persen	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	10 Perangkat Daerah	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	2.22.02 PROGRAM	Presentase budaya	60 Persen	2.22.02.2.01	Tersedianya Objek	3 Objek	2.22.02.2.01.01 Pelindungan,	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang	3 Objek	Kab.	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman		Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Sertifikasi Tenaga Permuseuman	2 Orang	Kepulauan Mentawai	
			2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2 Objek 5 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar yang dibina	4 sanggar	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	100 Persen	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN	100 Persen	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran	90 Persen	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistikk kantor yang disediakan	3 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	90 Persen	2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 Persen	2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya barang milik daerah dalam kondisi baik	90 Persen	2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	20 Persen	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai SNP	20 Persen	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	10 Persen		
							2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	1 Persen		
							2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Persen		
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	22 Persen	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	10 persen		
							2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Kab. Kepulauan Mentawai	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	30 Persen	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar	15 Persen	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pembinaan/Penataan serta Pengawasan tata kelola kearsipan pada OPD/Desa	10 OPD/Desa		
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten	15 Persen	2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10 Persen	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip sesuai NSPK	10 Persen	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 OPD		
							2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1 OPD		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen					
					Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan LAPORAN hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	2 Dokumen					

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				SKPD Tersedianya 23 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
				Tersedianya 3 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD							
				Tersedianya 4 Laporan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
			3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya 12 Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Orang	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Tersedianya 50 Dokumen Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							
				Tersedianya 2 Dokumen Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
				Tersedianya 16 Dokumen Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
				Tersedianya 2 Dokumen Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD							
				Tersedianya 2 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
				Tersedianya 48 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan							
						3.25.01.2.02.02 Penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dokumen	Semua		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan 5 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan 6 Paket Tersediannya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Paket Tersediannya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 Dokumen Tersediannya Jumlah 32 Paket		3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Paket Bahan Logistik Kantor Tersedianya Jumlah 6 Paket Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan							
					3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket			Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
					3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
					3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
					3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan			Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau	1 unit	3.25.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	50 Unit		Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 10 unit Tersedianya Jumlah Paket Mebel 0 unit Tersedianya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya 2 unit			Disediakan			Mentawai	
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Laporan		3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan			Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi 4 unit Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara 1 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharani/Direhabilitasi 3 unit Terbayarnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya 14 unit Terbayarnya Pemeliharaan Peralatan 5 unit		3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				dan Mesin Lainnya Terlaksananya 5 unit Pemeliharaan Aset Tetap dan Lainnya							
						3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.25.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil	9000 ton	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Meningkatkan Kapasitas Nelayan Kecil 950 Orang Tersedianya Unit Usaha yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Ppendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20 Kelompok 3 Unit Usaha	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah prasarana nelayan yang diadakan	604 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Tersedianya Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1 Dokumen 2 Layanan	3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	Kab. Kepulauan Mentawai		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan kelompok nelayan budidaya	250 ton	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya Jumlah Kelompok Usaha Yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Tersedianya Kelompok Pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan Tersedianya Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 kelompok 4 kelompok 10 Kelompok	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	4 Kelompok		Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	10 Kelompok		Kab. Kepulauan Mentawai	
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikanan yang produktif	17 persen	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1 Dokumen	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
			3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terkendalinya Mutu Ikan	44 unit	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha			
			3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93 Ton	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93 Ton		Kab. Kepulauan Mentawai	
				Tersedianya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan	2 unit						

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, laporan keuangan, dan lakip yang terbuat Jumlah musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri	4 Dokumen 10 Kali		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.26.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Lancarnya operasional Perkantoran Terbayarnya honorarium ASN Terbayarnya honorarium Non ASN	0 Dokumen 43 Orang 43 Orang 53 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		3.26.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah Meningkatnya PAD	0 Dokumen 1 tahun		Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.26.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat		3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	0 Paket		Semua Kab/Kota Kab.	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Daerah			Kantor	Disediakan			Kepulauan Mentawai	
						3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbayarnya ATK tersedianya alat kebersihan kantor Tersedianya alat makan minum	1 tahun 1 tahun 4 kali		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.26.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			
						3.26.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	0 Unit		Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			an Mentawai	
							Tersedianya kendaraan roda dua	4 Unit			
							Tersedianya laptop	6 unit			
							Tersedianya komputer PC	6 Unit			
							Tersedianya Kursi kantor	20 Unit			
							Tersedianya meja kantor	6 Unit			
							Tersedianya printer	10 Unit			
							Tersedianya scanner	2 Unit			
			3.26.01.2.08			3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							terbayarnya listrik dan air	1 tahun			
			3.26.01.2.09			3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		3.26.02.2.01			3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
			3.26.02.2.02			3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan	0 Dokumen	Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota tersedianya dokumen perencanaan perumahan masyarakat mapadegat menjadi kampung adat	1 Paket		an Mentaw ai	
						3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan sarana dan prasarana pendukung dilokasi kawasan wisata terbangunnya dermaga/jetty Terbangunnya gapura/identitas gerbang Terbangunnya ikon selamat datang dibumi sikerei Terbangunnya pos pengawas pantai Terbangunnya talud pantai mapadegat dan katiet Terpeliharanya bangunan uma/panggung kesenian di mapadegat dan kulukubuk Terpeliharanya gazebo di lokasi wisata mapadegat dan kulukubuk Terpeliharanya jalan pendestrian dikulukubuk dan mapadegat Terpeliharanya kafetaria mapadegat dan kulukubuk Terpeliharanya kantor TIC Terpeliharanya toilet dan ruang bilas di lokasi wisata mapadegat dan kulukubuk Tertatanya daerah aliran sungai kulukubuk Tertatanya halaman homestay	0 Unit 7 Unit/Jenis/Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Unit 6 Unit 500 Meter 2 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Paket 1 Paket		Semua Kab/Kot a	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								katiet			
			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Berkembangnya desa muntei menjadi kampung wisata berbasis budaya/adat Berkembangnya desa saibi samukop sebagai kawasan ekowisata Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Tersediannya dokumen perencanaan kawasan wisata sakaladat siberut barat Tersediannya dokumen perencanaan penataan kawasan wisata pantai sikabaluan Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan air terjun mattobat di desa bulasat Tersedianya Dokumen perencanaan kawasan wisata pantai mabolak sikakap Terselenggaranya mentawai gathering drone Tertatanya kawasan pariwisata mapadegat	1 Paket 1 Paket 0 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kali 1 Paket			
						3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terselenggaranya monev destinasi pariwisata	12 kali			
						3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota terbentuknya kelompok sadar wisata Terbentuknya satgas kebersihan wisata	0 Laporan 30 Orang 1 Paket			
			3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah			3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha wisata yang terawasi	10 unit	Kab. Kepulau an Mentaw		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Kabupaten/Kota							ai	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Terbuatnya Film Pariwisata Terfasilitasinya kegiatan operasional TIC dan pengawas pantai Tersedianya Kalender event pariwisata Tersedianya material promosi dan informasi pariwisata Terselenggaranya festival indigenious people Terselenggaranya festival muanggau Terselenggaranya festival Mujarik digoisok oinan Terselenggaranya festival pembuatan sampan tradisional mentawai Terselenggaranya Festival pesona mentawai Terselenggaranya festival tatto mentawai terselenggaranya kegiatan fasilitasi pemasaran	0 Laporan 1 Paket 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai		
						3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen			
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN		3.26.04.2.02 Pengembangan			3.26.04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	0 Dokumen			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Ekosistem Ekonomi Kreatif				Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif Tersediannya kalender event pariwisata mentawai 1 Tahun Tersedianya billboard pemasaran 1 Paket Terselenggarannya festival kuliner tradisional mentawai 1 Kali			
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 50 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
							3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	tersediannya tenaga kerja pariwisata yang bersertifikat 30 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
							3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 0 Laporan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan Terciptanya kreasi kuliner tradisional mentawai 5 Jenis			
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0 Orang Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif 40 Orang			
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku			3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan 20 Orang			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Ekonomi Kreatif			Kreatif	Ekonomi Kreatif				
						3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	50 Orang			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksannya monitoring kegiatan tahun berjalan	1 tahun	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meningkatnya pelayanan perencanaan dan evaluasi kinerja	0 Dokumen 2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksannya monitoring kegiatan	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	13 bulan	3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terlaksananya administrasi keuangan	0 Dokumen 14 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	0 Paket 100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan terlaksananya Kegiatan Administrasi	0 Paket 100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Umum			an Mentawai		
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	12 bulan	3.27.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya tempat parkir	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai		
			3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi Baik	1 paket	3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya terpeliharanya aset kendaraan dinas operasional	0 Unit	100 persen	Kab. Kepulauan Mentawai		
						3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang)	14000 kwintal	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	75 persen	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30 kali			
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mutu Produk Perternakan	80 persen	3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Terbelinya bibit ternak	0 Laporan	150 ekor	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya hijauan pakan ternak 50 ha		3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0 Ekor	Meningkatnya populasi ternak sapi dan kerbau 40 ekor		Kab. Kepulauan Mentawai	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan Utilitas Pertanian 85 persen	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersusunnya Peta L P2B dan Masterplan Pertanian 2 Peta		3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola 1 Dokumen				
						3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 1 Dokumen				
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian 85 persen		3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara 1 paket			Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit				
						3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya jalan usaha tani 1 meter			Kab. Kepulauan Mentawai	
						3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit				
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN	Penyakit Hewan Yang Tertangani 100 persen	3.27.04.2.04 Penerapan dan	Terdampinginya atau Tercegahnya Penyakit 60 Persen		3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 12 Laporan				

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menular ternak		Hewan				
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase bencana pertanian yang tertangani	100 persen	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 persen	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3 Ha	Kab. Kepulauan Mentawai	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Bina Kelompok tani yang produktif	40 persen	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Petani	40 persen	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Penyuluh PNS dan Non PNS Terlaksananya diklat penyuluh	2 paket 31 Orang		
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen		
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 unit	Semua Kab/Kota	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi	8 persen	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	30 Persen	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Kajian Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang di fasilitasi	3 Pasar	Kab. Kepulauan Mentawai	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 paket		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	7 Persen	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 dokumen		
							3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota jumlah operasi pasar murah	0 Laporan 2 kali		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 30%	10 kecamatan			
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0 Laporan			
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4 kecamatan			
						3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 Orang			
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	4 kecamatan			
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 event			
						3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	1 tahun			
						3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 tahun			
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG	Persentase kepatuhan	100 Persen	3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa	Terlaksananya Jasa pelayanan Kantor	55 Persen	3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Kepulau	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				terbayarnya Honor Non ASN	20 Orang	an Mentawai	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Pengembangan Industri	60 Persen	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sentra IKM	1 Sentra	3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 ranperda		
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah ikm yang di revitalisasi	1 Sentra	Kab. Kepulauan Mentawai	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	0 Dokumen		
								jumlah ikm yang di validasi	10 kecamatan		
								jumlah ikm yang di valitasi izin	2 kecamatan		
4.01 SEKRETARIAT DAERAH											
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Laporan Keuangan, LAKIP SKPD	20 dokumen	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi keuangan	2 layanan	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya aneka alat tulis kantor	12 Bulan	4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai		
						4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	8 Jenis	4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan internet, listrik, air besih dan telepon seluler (Pimnpnan Daerah)	12 Bulan	4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kot a Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Semua Kab/Kot a Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Kab. Kepulau an Mentaw ai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	2 Orang	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	28 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Terselenggaranya kebutuhan harian rumah tangga pimpinan daerah	12 Bulan	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi Persentase LAKIP OPD kategori baik	1 Dokumen 65 Dokumen	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	36 Dokumen	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36 Dokumen	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen			
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi keprotokolan yang terfasilitasi	24 Kali	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kab. Kepulau an Mentaw ai		
						4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kab. Kepulau an Mentaw ai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	2 Persen 100 Persen 88 Persen	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	85 Persen	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Terlaksananya Peningkatan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Forum Komunikasi Kecamatan Inventarisasi Permasalahan di Kecamatan dan Solusinya Terlaksananya Pembinaan terhadap Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Pedoman Teknis Penataan Wilayah Kecamatan	10 Kecamatan 10 Kecamatan 10 Kecamatan 1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Proses Administrasi Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota Legislatif Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menyusun Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Menyusun Bahan Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj)			
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	95 Persen	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	95 Persen	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	15 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pemda yang ditangani dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin	5 Kasus		Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan disebarluaskan	4 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										ai	
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	85 Persen	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Melakukan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Instansi Lainnya	1 Dokumen		Kab. Kepulau an Mentaw ai	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	80 Persen	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	30 Persen	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dewan Pengawas Defenitif Jumlah Regulasi BUMD dan BLUD	3 Orang 2 Regulasi	Kab. Kepulau an Mentaw ai	
						4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen ETPD Jumlah Dokumen koordinasi Tim Percepatan TPAKD Jumlah Dokumen Pengendalian Inflasi Standarisasi satuan harga barang dan jasa (SSHBJ)	2 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen		Kab. Kepulau an Mentaw ai	
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	80 Persen	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		Kab. Kepulau an Mentaw ai	
						4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan		Kab. Kepulau an Mentaw ai	
						4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		Kab. Kepulau an Mentaw ai	
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu	90 Persen	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen		Kab. Kepulau an Mentaw	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa	1 Layanan					ai	
						4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan Kebijakan pengadaan barang dan jasa	80 orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik Tersedianya layanan kebijaka SDA	30 Persen 30 Persen 1 Layanan	4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
4.02 SEKRETARIAT DPRD											
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 DOK		Semua Kab/Kot	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Tugas ASN			a Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis		4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
							4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	Kab. Kepulauan Mentawai	
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
						4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dok		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Mabel	0 Unit 2 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rek		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Pegawai Kontrak	59 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Daerah							ai	
						4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	22 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	20 Orang/Bulan			
						4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	164 Stel			
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 Laporan			
						4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			
						4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	16 Dokumen			
						4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen			
						4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1 Dokumen			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen			
						4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen			
						4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1 Dokumen			
						4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen			
						4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen			
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan			
						4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan			
						4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan			
						4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan			
						4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan			
						4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen			
						4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	1 Dokumen			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Daerah				
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen			
						4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6 Dokumen			
						4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang			
						4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	4 Orang			
						4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusun Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen			
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan			
						4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	3 Dokumen			
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6 Dokumen			
						4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	0 Laporan 3 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai		
5.01 PERENCANAAN											
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase kepatuhan penyusunan	100 Persen	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi	2 Layanan	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah			Keuangan					an Mentawai	
							5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 orang	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah	3 layanan	5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan penunjang perangkat daerah	2 layanan	5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	4 layanan	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit		Semua Kab/Kota Kab.	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya			Kepulauan Mentawai	
						5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	konsistensi program RPJMD Kedalam RKPD	100 persen	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah	3 tahapan	5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	2 berita acara		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi	Tersedianya Layanan Data dan Informasi Bidang	4 Dokumen	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan		(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			Mentawai		
					5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	78 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai		
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah koordinasi pengendalian dan monitoring pembangunan	10 kali	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	85 Persen	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Layanan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	4 layanan	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai	
					5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai		
					5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	0 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
						5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya layanan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	5 layanan	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan		Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			an Mentawai	
						5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan			
						5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya layanan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 layanan	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	10 Laporan		Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	pada Bidang Infrastruktur		an Mentawai	
							5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai	
5.02 KEUANGAN											
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	2 Layanan	5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	2 Dokumen	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen	5.02.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat	Meningkatnya Layanan Adm.	7 Layanan	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab.	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Daerah	Perkantoran		Kantor	Disediakan			Kepulauan Mentawai	
						5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang	Meningkatnya	2 Layanan	5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	1 Unit		Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Keti.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan Adm. Perkantoran		Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			an Mentawai	
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	1 Layanan	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
						5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	3 Layanan	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
						5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	90 Persen	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			
						5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			
						5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			
						5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen			
						5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72 Orang			
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID	5 Dokumen	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen			
						5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen			
						5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3 Dokumen			
						5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan	12 Laporan			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
						5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data 9 Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK	7 Dokumen	5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan 41 Dokumen Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				
						5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 18 Laporan				
						5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 37 Laporan				
						5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen				

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
						5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen			
						5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen			
						5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	72 Orang			
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Baik	2 Dokumen	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan			
						5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 Persen	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar	6 Dokumen	5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen		
							5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 Laporan		
							5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	10 Laporan		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Barang Milik Daerah	Daerah				
						5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen			
						5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan			
						5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total pendapatan	8.5 Persen	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi, Intensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6 Dokumen	5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		
							5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit		
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Obyek Pajak		
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen		
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen		
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
5.03 KEPEGAWAIAN											
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 Persen	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							5.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 Persen	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah	12 Laporan	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tebaga Kontrak yg di bayarkan	18 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										ai	
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perkantoran	5 Unit	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
						5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	200 indek	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya Pemberhentian dan Informasi ASN	60 Persen	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
						5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN Sesuai Anjab dan ABK	60 Persen	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	300 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN	60 Persen	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	23 Orang		Kab. Kepulauan Mentawai	
						5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	60 Persen	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
						5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan 10 Orang	Kedisiplinan		Kab. Kepulauan Mentawai			
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	10 Persen	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksanannya Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan	20 Persen	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10 Orang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksanannya Peningkatan dan pengembangan Kopetensi Manajerial dan Fungsional	25 Persen	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai		
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai		
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	2 penelitian	5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH											
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
						6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	100 Persen	6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										ai	
						6.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket software yang disediakan Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Paket 0 Unit			
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		Kab. Kepulauan Mentawai	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR	Kapabilitas APIP level 3 level	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan	Terlaksananya Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	AAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	80 Persen	Pengawasan Internal							
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan		
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108 Laporan		
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan		
							6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan		
							6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	85 Persen	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 Persen	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		
							6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	0 Rekomendasi		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						Fasilitasi Pengawasan	Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		
			6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya Zona Integritas	100 Persen 100 Persen	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah			
						6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	9 perangkat daerah			
						6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan			
						6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah			
7.01 KECAMATAN											
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan	B Indek 100 Persen 100 Persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Desa yang di Evaluasi Jumlah Monitoring dan Evaluasi Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Persentase Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	3 Desa 100 Persen 80 Persen 100 Persen	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 6 Laporan 8 Laporan 12 Kali 28 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		pelayanan tugas perangkat daerah			Tersedianya layanan perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 layanan 90 Persen		Perangkat Daerah			
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan adminsitasi umum yang dilaksanakan Jumlah Penerima Gaji dan Tunjanang ASN Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan tersedianya layanan administrasi keuangan Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan	11 Kegiatan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 2 layanan 90 Persen	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pegawai yang menerima Gaji dan tunjangan daerah	0 Orang/bulan 11 Orang/bulan 14 Orang/bulan 16 Orang/bulan 19 Orang/bulan 23 orang/bulan 23 Orang/bulan 26 Orang/bulan 11 Orang	Semua Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai		
						7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kabupaten		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kepulauan Mentawai	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Orang			
							Jumlah Ketersediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan			
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan yang dilaksanakan	11 Layanan	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			
				Persentase Kebutuhan Paket yang tersedia	100 Persen		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			
				Persentase terlaksananya Administrasi Umum Daerah	100 Persen		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis			
				TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM	4 LAYANAN LAYANAN ADMINISTRASI UMUM		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			
				Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Perangkat Daerah	90 Persen		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			
							penerangan Kantor Tercukupi disetiap Bulan	4 Jenis			
						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		Kab. Kepulauan Mentawai	
							Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Laptop Komputer dan Printer	7 Paket		
							7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai	
							7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor yang tersedia Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Meningkatkan Serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	13 Jenis 25 Jenis 559 kotak 3 Paket 4 Paket 12 Paket 32 Paket 51 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis 0 Paket 1 Paket 2 Paket 4 Paket 10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 buku 15 Jenis		
						7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan 10 Laporan 12 Laporan 24 Laporan 26 Laporan 28 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana diadakan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Jenis 75 Persen 100 Persen	7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
						7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Mentawai	
						7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit 20 Unit 100 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit 3 Unit 5 Unit 6 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			
						7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 3 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
						7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor	90 Persen			
						Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	12 Bulan				
						7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening 0 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Persentase Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urrusan Pemerintah Daerah tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah	100 Persen 100 persen 100 Persen 2 layanan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening penyediaan jasa komunikasi air dan listrik yang terbayarkan Tersedianya Jasa Sumber daya Listrik	12 bulan 12 Laporan 12 bulan 1 Rekening 24 bulan	ai		
						7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum	0 Laporan 12 Laporan 16 Laporan 20 Orang 15 Orang 28 Orang 12 Bulan	Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan aset yang dipelihara Persentase Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Jasa Pemeliharaan Barang Inventaris tersedianya layanan pemeliharaan BMD	2 Jenis 100 Persen 100 persen 80 Persen 90 Persen 1 layanan	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit 3 Unit 5 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit 4 Unit 6 Unit 8 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
							7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 jenis 6 Unit 10 Unit 14 Unit 16 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 7 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
							7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 2 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	
							7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan	B Indeks	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	tersedianya layanan penyelenggaraan kegiatan tingkat kecamatan	1 layanan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai	
					Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat	2 Urusan		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan terhadap masyarakat	150 Dokumen		
					Persentase Kepatuhan Teknis Peraturan Pelayanan Perizinan	100 Persen					
					Tersedianya Dokumen Kependudukan Masyarakat	90 Persen					
					tersedianya layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 layanan	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Penduduk yang terekam KTP-EL	100 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Indek	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa Jumlah masyarakat, LPM dan desa yang terbina Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Peksanaan Forum Pembangunan Tk,Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa tersedianya layanan pemberdayaan Desa	3 Desa 95 Persen 65 Persen 100 Persen 1 kali 90 Persen 2 layanan	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Terciptanya perencanaan yang berkeadilan dan berkelanjutan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 3 desa 7 Lembaga 1 kali 1 kali	Kab. Kepulauan Mentawai	
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 3 desa 3 Laporan 4 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								<p>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan</p>			
			7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penumbuhan Karakter Kesadaran dalam Pemangamalan Pancasila	100 Persen	7.01.03.2.06.01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	<p>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 1 Keluarga</p> <p>Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pelestarian bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Kali</p>				
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<p>Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan</p> <p>Perayaan HUT RI</p> <p>Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesai</p>	B indeks	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<p>Jumlah kegiatan HUT RI 1 Kegiatan</p> <p>Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kecamatan sesuai penugasan kepala daerah 1 Kegiatan</p> <p>Persentase Nilai-Nilai Bhinneka 100 Persen</p>	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang</p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 100 Orang</p>	Kab. Kepulauan Mentawai			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		kan Persentase Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 Persen 100 persen	Tunggal Ika Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Perayaan HUT RI tersedianya layanan urusan pemerintahan umum	100 Persen 90 Persen 2 layanan	Kesatuan Republik Indonesia	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang 400 Orang			
						7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 6 Dokumen 10 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen 24 Dokumen 3 Laporan		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu Persentase Penataan Dokumen Aset di Tk.Kecamatan	B 100 Persen 85 Persen 100 Persen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Jumlah Fasilitasi ADD yang dilaksanakan Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi Persentase Penataan Dokumen dan Pengawasa Aset Desa di Tk.Kecamatan Terlaksananya Pemerintahan yang bebas KKN tersedianya layanan fasilitasi dan koordinasi desa	4 Desa 4 kali 80 Persen 100 Persen 90 Persen 2 layanan	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Desa 1 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen 7 Desa 9 Dokumen 12 Dokumen 27 Dokumen 4 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen		Kab. Kepulauan Mentawai	
						7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	fungsi kontrol dan fungsi evaluasi serta pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	3 Desa		Kab. Kepulauan Mentawai	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah gaji ASN yang dibayarkan	12 orang	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	meningkatnya pelayanan kinerja ASN	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan honor tenaga knrak	20 orang	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
							8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 macam	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ke t.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										ai	
						8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 macam		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 surat kabar		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
			8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang kebutuhan kantor	10 unit	8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		Kab. Kepulauan Mentawai	
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	8 kegiatan	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	meningkatnya pelayanan kinerja ASN	100 parsen		Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai	
						8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmeningkatnya pelayanan penunjang perangkat daerah	100 parsen		Kab. Kepulauan Mentawai	

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang mlk darah	15 unit	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
						8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kepulauan Mentawai		
	8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang			
						8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang			
						8.01.02.2.01.06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga			

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	75 persen	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah dana hibah banpol yang dibayarkan dan tersalurkan danan hibah pemilu	10 kegiatan	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai	
							8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 tahun		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas aktif	70 Persen	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Jumlah laporan monitoing	1 lapaon	8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Kemasyarakatan								
						8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan			
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	100 Persen	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Menngkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya	75 Parsen	8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah rapat Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 kali	Kab. Kepulauan Mentawai	
							8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 kali		
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah rapat Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 kali		
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Persentase konflik sosial tertangani	100 Persen	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Terrlaksananya Koordinas di bidang kewaspadaan dini, koordibas di bidang konflik sosial dan terpantaunya tenaga	100 Parsen	8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	0 Dokumen		

TABEL 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			Penanganan Konflik Sosial	kerja asing seta terfasilitasinya forkopinda		Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			
						8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang			
						8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 kali			
						8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan			
						8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	Kab. Kepulauan Mentawai		

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Rekapitulasi plafon anggaran menurut urusan pemerintahan adalah sebagaimana berikut:

TABEL 4.2
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	194.775.554.671	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	194.775.554.671	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	194.775.554.671	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.800.257.781	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.515.880.881	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	136.254.300.881	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.580.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	267.150.600	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	267.150.600	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.191.500	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	299.975.500	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.216.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.208.080.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.124.080.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.954.800	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.750.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.960.000	
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	29.250.000	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.994.800	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55.675.803.390	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.872.283.546	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.807.370.380	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.479.802.600	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.103.077.200	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	582.785.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	670.947.600	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.124.085.200	
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.314.225.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.026.384.400	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	168.171.800	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	168.146.800	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	421.051.500	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12.369.692.016	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	600.000.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	200.000.000	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.000.000.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.000.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	188.769.800	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120.000.000	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.377.774.250	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.023.175.944	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.278.800.000	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	500.000.000	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	300.000.000	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	800.000.000	
1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	300.000.000	
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	800.000.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	500.000.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000	
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	58.680.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	285.865.144	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.000.000.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	195.214.600	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	200.005.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	149.999.900	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.800.162.500	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	199.999.600	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	204.449.200	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	150.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.830.849.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	204.208.600	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	484.234.900	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	149.999.800	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	149.999.900	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	174.999.800	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	567.406.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	949.494.900	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	149.999.900	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.995.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	249.500.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	149.999.900	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	149.999.900	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	149.999.900	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	149.493.600	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.493.600	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.493.600	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	127.067.125.824	
1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	127.067.125.824	
1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	81.178.295.946	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.434.462.806	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.689.810.806	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.463.522.720	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.226.288.086	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.655.700	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.800.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.999.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.996.700	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.864.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.996.300	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.996.500	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.999.800	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22.408.833.140	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.900.924.340	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	800.000.000	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.055.830.840	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.000.093.500	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.000.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.545.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.257.908.800	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99.999.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	649.998.300	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	150.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	99.980.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.000.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70.000.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	150.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	397.931.100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	75.000.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.700.000.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	999.999.900	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	300.000.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	250.000.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	200.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	110.000.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	60.000.000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25.000.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	35.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100.000.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50.000.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	50.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	125.000.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	75.000.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	25.710.344.423	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.538.646.875	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.035.270.415	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.313.040.415	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.722.230.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.678.400	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.030.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	618.532.400	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.116.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.086.990.560	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	460.500.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.626.490.560	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.707.500	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.007.500	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.700.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.171.697.548	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.809.497.548	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	52.916.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	671.723.760	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	824.857.788	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	260.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	362.200.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	119.100.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	243.100.000	
1.02.0.00.0.00.02.0002	PUSKESMAS MAPADDEGAT	1.808.682.944	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.808.682.944	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.808.682.944	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.808.682.944	
1.02.0.00.0.00.02.0003	PUSKESMAS SIOBAN	1.970.804.808	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.970.804.808	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.970.804.808	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.970.804.808	
1.02.0.00.0.00.02.0004	PUSKESMAS BOSUA	884.859.441	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	884.859.441	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	884.859.441	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	884.859.441	
1.02.0.00.0.00.02.0005	PUSKESMAS MUARA SIBERUT	1.826.971.014	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.826.971.014	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.826.971.014	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.826.971.014	
1.02.0.00.0.00.02.0006	PUSKESMAS PEIPEI	1.278.598.904	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.278.598.904	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.278.598.904	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.278.598.904	
1.02.0.00.0.00.02.0007	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	1.259.962.999	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.259.962.999	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.259.962.999	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.259.962.999	
1.02.0.00.0.00.02.0008	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	1.837.715.954	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.837.715.954	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.837.715.954	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.837.715.954	
1.02.0.00.0.00.02.0009	PUSKESMAS BETAET	1.240.175.960	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.240.175.960	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.240.175.960	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.240.175.960	
1.02.0.00.0.00.02.0011	PUSKESMAS SIKAKAP	1.816.402.979	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.816.402.979	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.816.402.979	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.816.402.979	
1.02.0.00.0.00.02.0012	PUSKESMAS MALAKOPA	1.185.227.018	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.185.227.018	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.185.227.018	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.185.227.018	
1.02.0.00.0.00.02.0013	PUSKESMAS BULASAT	1.112.046.934	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.112.046.934	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.112.046.934	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.112.046.934	
1.02.0.00.0.00.02.0014	PUSKESMAS SAREREIKET	1.021.153.728	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.021.153.728	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.021.153.728	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.021.153.728	
1.02.0.00.0.00.02.0015	PUSKESMAS SIMATALU	967.524.974	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	967.524.974	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	967.524.974	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	967.524.974	
1.02.0.00.0.00.02.0016	PUSKESMAS SIGAPOKNA	933.834.854	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	933.834.854	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	933.834.854	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	933.834.854	
1.02.0.00.0.00.02.0017	PUSKESMAS SAUMANGANYA	1.034.522.944	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.034.522.944	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.034.522.944	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.034.522.944	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66.265.499.380	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.0.00.0.00.03.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66.265.499.380	
1.03.0.00.0.00.03.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65.565.499.380	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.486.280.813	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.665.380	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.665.380	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.275.802.733	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.138.922.733	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.136.880.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.161.200	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.900.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.974.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.535.200	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.500.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.252.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.800.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.800.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.851.500	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.205.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.960.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.686.500	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.750.510.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.349.150.000	
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.749.150.000	
1.03.02.2.01.33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	600.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.401.360.000	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	201.360.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.200.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.202.029.800	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.202.029.800	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	703.028.000	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	535.414.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.960.470.400	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	722.476.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.998.470.000	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.282.171.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	340.000.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	340.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	607.227.047	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	607.227.047	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	607.227.047	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.099.686.200	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.099.686.200	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.099.686.200	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	36.300.747.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	36.300.747.000	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.213.945.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.250.853.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	10.762.109.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	8.559.137.775	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.636.060.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.392.808.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	4.386.905.500	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	330.924.500	
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	150.000.000	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.618.004.225	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	157.340.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	157.340.000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	157.340.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.621.678.520	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	268.211.000	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	63.688.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	54.523.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.000.938.860	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.000.938.860	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	292.187.660	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	186.008.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	106.179.660	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	60.341.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	60.341.000	
1.03.0.00.0.00.03.0001	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	700.000.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	700.000.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.000.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.361.996.099	
1.04.2.10.0.00.04.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.361.996.099	
1.04.2.10.0.00.04.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.361.996.099	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.236.278.799	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.948.796.349	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.845.836.349	
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.960.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.241.600	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.296.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.600	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.950.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.122.000	
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	52.004.000	
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.118.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.220.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.220.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.898.850	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.070.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.994.850	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.884.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.771.825.900	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	99.999.900	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	99.999.900	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.413.858.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	148.064.000	
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	80.365.000	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.185.429.000	
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	79.415.000	
1.04.02.2.04.02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	79.415.000	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	78.553.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	78.553.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.497.208.400	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	150.000.000	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.347.208.400	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	797.500.000	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	350.000.000	
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	199.708.400	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	856.683.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	856.683.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	798.070.000	
1.04.05.2.01.05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	58.613.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.405.199.400	
1.05.0.00.0.00.05.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.105.538.629	
1.05.0.00.0.00.05.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.105.538.629	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.346.580.829	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.452.118.029	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.402.918.029	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.200.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.070.800	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.996.000	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.957.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.998.800	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.145.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.974.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262.447.000	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.455.000	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.992.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.044.660.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.800.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.924.860.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.285.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.915.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.240.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.170.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.960.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	249.402.800	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	174.630.800	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	89.636.800	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	84.994.000	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	74.772.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	74.772.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	509.555.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	178.483.000	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.031.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.620.000	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	46.996.000	
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.836.000	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	66.090.000	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	66.090.000	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	124.065.000	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	124.065.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	140.917.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	74.606.000	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	66.311.000	
1.05.1.06.0.00.05.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.299.660.771	
1.05.1.06.0.00.05.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.299.660.771	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.202.325.971	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.575.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.575.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.355.989.571	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.286.989.571	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.989.400	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.985.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.342.400	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.750.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.922.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.470.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.400.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.162.070.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.302.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.660.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.010.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.660.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.972.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.097.334.800	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	185.481.600	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	185.481.600	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	571.140.200	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	184.767.600	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	202.070.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	184.302.600	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	340.713.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	221.706.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	119.007.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.937.478.660	
1.06.2.08.0.00.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.937.478.660	
1.06.2.08.0.00.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.937.478.660	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.803.227.660	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.620.354.932	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.592.754.932	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.600.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.510.775	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.088.500	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.414.075	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.024.700	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.001.500	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.982.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.890.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.950.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	552.940.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.471.953	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.997.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.179.600	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.880.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.415.153	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	250.000.000	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	50.000.000	
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	794.300.100	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	794.300.100	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	750.000.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.100	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	5.000.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	19.300.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	54.950.900	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	54.950.900	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.951.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.999.900	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	35.000.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	20.000.000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	20.000.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	15.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.008.062.150	
2.18.2.07.0.00.18.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.008.062.150	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.2.07.0.00.18.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.008.062.150	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	193.639.800	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	193.639.800	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	193.639.800	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	594.422.450	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	594.422.450	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	494.422.450	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	219.999.900	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	219.999.900	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	219.999.900	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	946.467.100	
1.06.2.08.0.00.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	946.467.100	
1.06.2.08.0.00.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	776.467.100	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	201.704.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	78.949.000	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	38.932.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.017.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	63.720.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.580.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	33.140.000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	59.035.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.023.000	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.012.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	124.684.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.684.000	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.684.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.593.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.593.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	20.593.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	192.703.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	94.114.000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	63.414.000	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.700.000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	98.589.000	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.794.000	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.795.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	236.783.100	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.993.500	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15.993.500	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.789.600	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.789.600	
1.06.2.08.0.00.06.0001	UPTD PPA	170.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	35.000.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	135.000.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.675.738.898	
2.09.3.27.0.00.09.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.675.738.898	
2.09.3.27.0.00.09.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.675.738.898	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.675.738.898	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.343.788.898	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.343.788.898	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.000.000	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.000.000	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.950.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.950.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.450.861.511	
2.11.0.00.0.00.11.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	7.450.861.511	
2.11.0.00.0.00.11.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	7.450.861.511	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.304.359.985	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.118.442.589	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.075.242.589	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.200.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	751.244.550	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.730.500	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.998.850	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.055.400	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.859.800	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.990.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.610.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.807.920	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	82.807.920	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.061.640.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.013.640.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.224.926	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.319.492	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.845.434	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.060.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	600.000.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	600.000.000	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	600.000.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	116.631.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	154.473.000	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	81.515.000	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	81.515.000	
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	72.958.000	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	72.958.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.275.397.526	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1.225.397.726	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	139.254.100	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	78.855.026	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	130.999.800	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	876.288.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	49.999.800	
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	49.999.800	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.090.930.248	
2.12.0.00.0.00.12.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.090.930.248	
2.12.0.00.0.00.12.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.090.930.248	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.668.010.648	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.305.524.848	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.279.124.848	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.400.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.955.800	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.980.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.764.200	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.109.600	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.702.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.870.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	823.070.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.660.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.660.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	544.615.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	544.615.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	544.615.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	361.268.100	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	361.268.100	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	361.268.100	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	363.052.500	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	219.288.500	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	84.053.000	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	135.235.500	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	143.764.000	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	143.764.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	153.984.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	153.984.000	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	126.641.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	27.343.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.753.651.336	
2.13.2.14.0.00.13.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.753.651.336	
2.13.2.14.0.00.13.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.753.651.336	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.288.651.436	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.522.895.746	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.461.695.746	
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.200.000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	660.437.142	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.024.447	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.995.000	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.996.200	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.495.000	
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.934.495	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.992.000	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	349.975.040	
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	99.975.040	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.440.700.408	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.960.408	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.338.740.000	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.643.100	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.999.100	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.680.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.964.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.13	Penataan Organisasi	30.000.000	
2.13.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.000.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	748.121.900	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	748.121.900	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	35.000.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	70.000.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.000.000	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	75.000.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	75.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	15.000.000	
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	178.122.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	99.999.900	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50.000.000	
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50.000.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	716.878.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	716.878.000	
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	40.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	406.878.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.656.245.350	
2.13.2.14.0.00.13.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.656.245.350	
2.13.2.14.0.00.13.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.656.245.350	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	392.112.800	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	224.839.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	40.000.000	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	90.000.000	
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	34.920.000	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	19.935.000	
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	19.990.000	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	19.994.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167.273.800	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	10.000.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	9.994.200	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	147.279.600	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.264.132.550	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	564.181.250	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	29.994.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.994.000	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	29.998.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	23.712.000	
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	14.995.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	192.335.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	171.186.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	76.967.250	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	699.951.300	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	299.999.300	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	90.000.000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	60.000.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	249.952.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	20.325.530.866	
2.15.0.00.0.00.15.0000	DINAS PERHUBUNGAN	20.325.530.866	
2.15.0.00.0.00.15.0000	DINAS PERHUBUNGAN	20.325.530.866	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.579.485.130	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.511.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.511.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.869.500.430	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.776.500.430	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.000.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.209.500	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.069.500	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.926.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.679.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.540.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.474.000	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.474.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.034.850.200	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.902.850.200	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.940.000	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.940.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	915.067.036	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	372.814.000	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	372.814.000	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	55.260.336	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.260.336	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	140.000.200	
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	90.000.200	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.906.900	
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.906.900	
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.085.600	
2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.085.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	
2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	7.830.978.700	
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.710.575.200	
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.710.575.200	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	120.403.500	
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	120.403.500	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.814.992.697	
2.16.2.21.2.20.16.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.814.992.697	
2.16.2.21.2.20.16.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.814.992.697	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.282.614.457	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.497.220.607	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.461.220.607	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.013.000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.060.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.953.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.363.000	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	34.999.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.364.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.100.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	989.100.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.917.850	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.995.850	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.992.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.249.999.900	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.249.999.900	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	650.000.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	250.000.000	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	199.999.900	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.282.378.340	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.782.378.340	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.782.378.340	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	200.000.000	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	300.000.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.091.331.881	
2.17.3.30.3.31.17.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.091.331.881	
2.17.3.30.3.31.17.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.091.331.881	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.297.715.281	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.887.967.631	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.843.567.631	
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.400.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.661.400	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.754.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.419.400	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.646.500	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.002.500	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.839.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.100.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.100.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.986.250	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.986.250	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	200.000.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	200.000.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	398.616.800	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	398.616.800	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	135.611.000	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	263.005.800	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.994.999.800	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.994.999.800	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.994.999.800	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.448.831.609	
2.18.2.07.0.00.18.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.448.831.609	
2.18.2.07.0.00.18.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.448.831.609	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.314.851.209	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.999.800	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.800	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.980.393.793	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.393.793	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.573.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.597.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.976.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.416.000	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.995.500	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.469.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.951.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.532.116	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.675.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.857.116	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.936.500	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.712.500	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.940.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.964.000	
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	539.228.900	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	89.229.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	89.229.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	449.999.900	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	449.999.900	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	201.565.500	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	201.565.500	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	201.565.500	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	393.186.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.186.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	237.340.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	155.846.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	599.999.800	
3.26.2.19.0.00.26.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	599.999.800	
3.26.2.19.0.00.26.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	599.999.800	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	400.000.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	400.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	199.999.800	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	199.999.800	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	199.999.800	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	40.000.000	
2.16.2.21.2.20.16.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.000.000	
2.16.2.21.2.20.16.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	40.000.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	555.211.200	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	555.211.200	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	555.211.200	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	405.211.200	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	200.000.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	205.211.200	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	205.211.200	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	150.000.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	13.819.850.862	
2.24.2.23.0.00.23.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.819.850.862	
2.24.2.23.0.00.23.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.819.850.862	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.519.856.412	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.999.900	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.900	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.673.717.512	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.617.917.512	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.800.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.205.000	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.256.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.949.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.594.000	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.594.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.270.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.470.000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.070.000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.000.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.070.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.299.994.450	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.995.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.995.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50.000.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.149.999.450	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	149.999.450	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	235.050.000	
2.24.2.23.0.00.23.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	235.050.000	
2.24.2.23.0.00.23.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	235.050.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	235.050.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	170.000.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	65.050.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	65.050.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.721.402.879	
3.25.0.00.0.00.25.0000	DINAS PERIKANAN	26.721.402.879	
3.25.0.00.0.00.25.0000	DINAS PERIKANAN	26.321.403.119	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.653.751.869	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.594.533.115	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.333.070.615	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.261.462.500	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.603.700	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.999.700	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.500.000	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.104.000	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.029.054	
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.029.054	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.960.000	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.960.000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.626.000	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.994.500	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.991.500	
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.640.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	18.885.629.350	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.785.629.500	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	18.785.629.500	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	99.999.850	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	99.999.850	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	549.999.700	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	549.999.700	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	249.999.900	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	199.999.800	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	232.022.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	57.107.200	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.107.200	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	99.915.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	99.915.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
3.25.0.00.0.00.25.0001	BBIP SIKAKAP	399.999.760	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	399.999.760	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	399.999.760	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	399.999.760	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.920.184.906	
3.26.2.19.0.00.26.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	11.920.184.906	
3.26.2.19.0.00.26.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	11.920.184.906	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.966.081.856	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.124.771.356	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.436.221.356	
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.688.550.000	
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000	
3.26.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	50.000.000	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.310.500	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.323.500	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.992.000	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.000.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.433.399.000	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	330.000.000	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	330.000.000	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.103.399.000	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.103.399.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	99.999.850	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99.999.850	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	99.999.850	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	420.704.200	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	420.704.200	
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	199.999.800	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	220.704.400	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	12.047.599.550	
2.09.3.27.0.00.09.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.047.599.550	
2.09.3.27.0.00.09.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.047.599.550	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.112.850	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.460.119.000	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.460.119.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.000.000	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.000.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.993.850	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.993.850	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.816.888.900	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.201.600.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.201.600.000	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	260.135.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	260.135.900	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.355.153.000	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.355.153.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.047.599.800	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	200.000.000	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	200.000.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	847.599.800	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	99.999.800	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	747.600.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	150.000.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	150.000.000	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	150.000.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.999.800	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	99.999.800	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	99.999.800	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	199.998.200	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	199.998.200	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	199.998.200	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	374.439.200	
2.17.3.30.3.31.17.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	374.439.200	
2.17.3.30.3.31.17.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	374.439.200	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	374.439.200	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	374.439.200	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	324.439.200	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.593.339.000	
2.17.3.30.3.31.17.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.593.339.000	
2.17.3.30.3.31.17.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.593.339.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	402.550.000	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.550.000	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402.550.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.190.789.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.190.789.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.190.789.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	50.325.057.881	
4.01.3.29.2.10.41.0000	SEKRETARIAT DAERAH	50.325.057.881	
4.01.3.29.2.10.41.0000	SEKRETARIAT DAERAH	50.325.057.881	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.386.010.831	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.020.000	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.020.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.629.721.357	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.503.721.357	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.833.859.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	699.999.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	167.600.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	700.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.266.260.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.175.425.600	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.818.400.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	82.035.600	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.990.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.691.340.500	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.450.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.192.890.500	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.647.521.400	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	399.999.900	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.547.550.000	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.980.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.499.991.500	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.589.446.104	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	478.446.104	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	111.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	449.995.550	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	449.995.550	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	626.000.120	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	110.000.120	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	692.681.200	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolkan	348.471.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	104.985.800	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	239.224.400	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.650.866.400	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	566.125.800	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	152.266.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Wilayah	222.319.900	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	191.539.900	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.835.749.600	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.551.718.400	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.784.031.200	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.500.000.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	965.991.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	220.333.200	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	590.617.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	155.040.800	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.283.000.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.283.000.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.288.180.650	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	490.800.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	307.502.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	183.298.800	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	723.515.250	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	184.601.500	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	180.549.900	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	358.363.850	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.223.600	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	374.493.400	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	540.094.200	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	235.636.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.923.641.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.923.641.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	33.104.350.238	
4.02.0.00.0.00.42.0000	SEKRETARIAT DPRD	33.104.350.238	
4.02.0.00.0.00.42.0000	SEKRETARIAT DPRD	33.104.350.238	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.628.078.438	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.540.871.211	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.871.211	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.000.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.416.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.416.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	993.114.627	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.224.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.268.927	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.960.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	354.158.200	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.980.500	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.975.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.548.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.560.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	194.560.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.461.600.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.500.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.160.100.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.692.800	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	282.532.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.870.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.290.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.615.592.200	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.426.682.200	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	188.910.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	89.231.600	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	89.231.600	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.476.271.800	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.758.082.000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	290.948.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.154.746.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	280.888.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	31.500.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	766.343.600	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	31.835.800	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	32.414.800	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	231.940.600	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	234.266.600	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	235.885.800	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.636.762.600	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	750.374.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	692.576.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	757.964.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	553.602.000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	430.376.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	213.415.800	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	238.454.800	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.593.379.800	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.893.784.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	270.000.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.000.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	9.595.800	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.195.513.400	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.017.688.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	3.177.825.400	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	2.526.190.400	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.497.928.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	28.262.400	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	9.592.758.900	
5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.592.758.900	
5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.592.758.900	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.270.961.900	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.381.919.750	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.315.919.750	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.000.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	638.904.400	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.949.500	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.999.900	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.000.000	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.960.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.738.000	
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.950.000	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.800.000	
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.988.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	758.735.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.975.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.760.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.664.750	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.983.750	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.689.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.992.000	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.971.797.800	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.369.541.200	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	192.698.400	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	399.078.800	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	777.764.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	223.978.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	109.875.200	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	114.103.200	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	378.278.200	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	378.278.200	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.349.999.200	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	450.000.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.000.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	190.000.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	449.999.300	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	139.999.800	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69.999.800	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	49.999.900	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	139.999.800	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	50.000.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	449.999.900	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180.000.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.000.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99.999.900	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	110.000.000	
5.02	KEUANGAN	159.651.951.100	
5.02.0.00.0.00.52.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	159.651.951.100	
5.02.0.00.0.00.52.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	159.651.951.100	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.948.803.017	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.459.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.459.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.050.832.661	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.667.027.661	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	383.805.000	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	125.272.000	
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	125.272.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	683.939.880	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.550.000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.908.880	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.577.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.100.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.990.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.814.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.261.500	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.261.500	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.379.973.976	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	729.456.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	650.517.976	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.064.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.204.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.860.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	120.711.506.933	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.547.915.900	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	101.309.200	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.449.800	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	842.109.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	839.019.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	216.896.900	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	471.132.000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.064.909.200	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	324.977.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	199.355.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	130.318.800	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	253.868.200	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	156.390.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.139.129.000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	61.209.100	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.390.800	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	201.787.800	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	206.211.000	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	122.609.000	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	148.185.800	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	339.735.500	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	115.959.552.833	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.485.992.060	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	103.473.560.773	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	418.735.550	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	418.735.550	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	36.644.450	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	92.272.200	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	76.225.400	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	121.272.000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	56.791.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	35.530.500	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.572.905.600	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.572.905.600	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	183.213.600	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	227.487.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	204.982.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	97.138.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	379.918.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	480.167.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	7.574.342.535	
5.03.5.04.0.00.53.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.574.342.535	
5.03.5.04.0.00.53.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.574.342.535	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.064.741.835	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.750.356.721	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.631.756.821	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.600.000	
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.000.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.999.900	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.237.844	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.011.250	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.907.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.999.594	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.061.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.259.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.317.088	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.800.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	397.517.088	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.830.182	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.994.800	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.500.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.012.800	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.322.582	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.509.600.700	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	387.168.700	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	192.318.900	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	74.997.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	119.852.800	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	727.579.800	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	652.599.800	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	74.980.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.244.852.300	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.244.852.300	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	149.999.900	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	74.999.900	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	75.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.575.736.600	
5.03.5.04.0.00.53.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.575.736.600	
5.03.5.04.0.00.53.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.575.736.600	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.575.736.600	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.275.736.600	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.275.736.600	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.300.000.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.300.000.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	794.799.900	
5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	794.799.900	
5.01.5.05.0.00.51.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	794.799.900	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	794.799.900	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	275.218.900	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	275.218.900	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	519.581.000	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	258.079.000	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	261.502.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	9.703.438.607	
6.01.0.00.0.00.61.0000	INSPEKTORAT	9.703.438.607	
6.01.0.00.0.00.61.0000	INSPEKTORAT	9.703.438.607	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.117.962.407	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.699.607.707	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.654.367.707	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.240.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.991.800	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.991.800	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.652.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.750.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.363.400	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.539.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	305.200.600	
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.445.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.650.000	
6.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	110.105.600	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.514.900	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.820.900	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.694.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.995.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.995.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.886.849.200	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.228.377.200	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	422.995.600	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	329.997.800	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	399.998.400	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	111.303.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	499.983.600	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	211.225.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	252.873.800	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	658.472.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	164.065.400	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	494.406.600	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	698.627.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	273.536.200	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	78.745.000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	194.791.200	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	425.090.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.001.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	85.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	155.090.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	84.999.800	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	32.479.453.945	
7.01.0.00.0.00.71.0000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	6.801.144.567	
7.01.0.00.0.00.71.0000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	6.801.144.567	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.618.558.367	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.810.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.810.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.593.124.067	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.290.589.067	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	302.535.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.684.300	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.630.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.549.900	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.004.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.584.100.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	79.900.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.504.200.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.380.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.380.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.460.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.460.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.200.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.200.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.708.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.708.200	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.709.200	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.999.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.998.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.998.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.974.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51.024.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.680.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.680.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.680.000	
7.01.0.00.0.00.72.0000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	2.440.988.822	
7.01.0.00.0.00.72.0000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	2.440.988.822	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.206.221.372	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.003.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.003.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.699.888.072	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.557.668.072	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.220.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.498.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.009.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.400.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.009.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.080.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.062.300	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18.098.800	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.963.500	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.050.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.050.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.720.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.720.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.930.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.930.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.930.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.974.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.974.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.016.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.958.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.228.700	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.228.700	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.827.500	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61.401.200	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.634.750	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.634.750	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	90.634.750	
7.01.0.00.0.00.73.0000	KECAMATAN SIBERUT BARAT	2.344.975.535	
7.01.0.00.0.00.73.0000	KECAMATAN SIBERUT BARAT	2.344.975.535	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.085.129.535	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.280.400	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.280.400	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.538.082.935	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.324.162.935	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.920.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.646.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.016.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.130.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.120.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.120.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.962.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	51.962.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51.962.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.011.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.011.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.190.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.821.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	73.518.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	73.518.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.157.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	55.361.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.355.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.355.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	73.355.000	
7.01.0.00.0.00.74.0000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	2.490.006.479	
7.01.0.00.0.00.74.0000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	2.490.006.479	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.358.971.979	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.769.500	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.769.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.855.913.979	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.645.263.979	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.650.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.062.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.035.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.027.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.226.500	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	49.195.500	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.431.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.600.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.191.250	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.191.250	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.191.250	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.088.750	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.088.750	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.731.250	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.357.500	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.925.300	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.925.300	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	31.925.500	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.999.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.829.200	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.829.200	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.829.200	
7.01.0.00.0.00.75.0000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	3.194.684.953	
7.01.0.00.0.00.75.0000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	3.194.684.953	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.894.696.953	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.225.500	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.225.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.229.937.043	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.050.907.043	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.030.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.953.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.812.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.001.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.140.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.081.410	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.210.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.065.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.806.410	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.830.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.230.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.230.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.600.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39.600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.028.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.028.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.618.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.410.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.970.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.970.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.140.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	58.830.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.160.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.160.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	51.030.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	34.130.000	
7.01.0.00.0.00.76.0000	KECAMATAN SIPORA UTARA	2.906.775.900	
7.01.0.00.0.00.76.0000	KECAMATAN SIPORA UTARA	2.906.775.900	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.647.728.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.940.400	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.940.400	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.836.911.220	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.803.311.220	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.600.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.193.200	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.925.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.645.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.254.800	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.368.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.203.180	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.203.180	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.880.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.880.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.600.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.490.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.650.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.680.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.780.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	53.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	28.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.328.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.328.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.728.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.600.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	113.719.900	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	113.719.900	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	33.720.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	79.999.900	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.000.000	
7.01.0.00.0.00.77.0000	KECAMATAN SIPORA SELATAN	3.383.121.177	
7.01.0.00.0.00.77.0000	KECAMATAN SIPORA SELATAN	3.383.121.177	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.169.122.077	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.523.548.977	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.423.548.977	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.987.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.992.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.151.000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.219.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.932.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.240.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.240.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.195.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.196.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.999.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.999.800	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.999.800	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	34.999.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69.999.700	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.999.800	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29.999.800	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.999.900	
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	19.999.900	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	58.999.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.999.800	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.999.900	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.999.900	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.999.800	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.999.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.999.800	
7.01.0.00.0.00.78.0000	KECAMATAN PAGAI UTARA	2.636.330.736	
7.01.0.00.0.00.78.0000	KECAMATAN PAGAI UTARA	2.636.330.736	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.390.330.736	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.852.159.836	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.685.772.336	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	166.387.500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.770.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.647.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.060.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.681.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.400.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.982.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.400.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.400.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.832.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70.832.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.977.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.855.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91.437.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91.437.500	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49.930.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	41.507.500	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	83.730.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.730.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34.990.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	48.740.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.79.0000	KECAMATAN PAGAI SELATAN	2.846.545.480	
7.01.0.00.0.00.79.0000	KECAMATAN PAGAI SELATAN	2.846.545.480	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.605.350.480	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.026.250	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.026.250	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.831.497.530	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.621.394.230	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.103.300	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.606.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.330.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.431.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.845.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.050.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.250.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.170.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.960.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.210.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.332.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.332.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.290.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.042.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.643.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.643.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	643.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	149.220.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	149.220.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	149.220.000	
7.01.0.00.0.00.80.0000	KECAMATAN SIKAKAP	3.434.880.296	
7.01.0.00.0.00.80.0000	KECAMATAN SIKAKAP	3.434.880.296	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.258.336.946	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.994.700	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.994.700	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.847.867.646	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.705.190.646	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.677.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.805.600	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.995.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.460.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.350.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.349.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.349.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.320.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.320.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.995.550	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.995.550	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19.995.550	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.991.800	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.991.800	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.994.200	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.997.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.558.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.558.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.558.800	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.999.200	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.998.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.998.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.998.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.193.186.893	
8.01.0.00.0.00.08.0000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.193.186.893	
8.01.0.00.0.00.08.0000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.193.186.893	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.731.827.693	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.242.528.193	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.206.528.193	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.058.100	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.047.000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.001.200	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.005.900	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.014.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.519.000	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.519.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.600.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.800.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.122.400	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.002.400	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.600.875.800	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.600.875.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.550.000.000	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50.875.800	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	51.198.600	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	51.198.600	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	51.198.600	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	336.013.800	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	336.013.800	
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	119.968.000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	166.045.800	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	473.271.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	473.271.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.628.000	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.800.000	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	291.843.000	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berisikan kondisi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Untuk plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dilihat pada tabel berikut.

TABEL 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	Belanja Pegawai	354.356.505.077
2	Belanja Barang dan Jasa	291.869.062.676
3	Belanja Subsidi	6.500.000.000
4	Belanja Hibah	11.970.142.200
5	Belanja Bantuan Sosial	1.954.250.000
6	BELANJA MODAL	91.368.138.890
	Belanja Modal Tanah	10.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.945.071.065
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.399.939.050
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.913.128.775
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000
7	Belanja Tidak Terduga	12.485.992.060
8	Belanja Bagi Hasil	1.575.096.173
9	Belanja Bantuan Keuangan	101.898.464.600
	TOTAL	873.977.651.676

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023 bersumber dari pemanfaatan SiLPA.

Berdasarkan kondisi perekonomian pada tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 yang tertuang dalam kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023, maka rencana pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut.

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 39.594.064.985, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2022 (SiLPA) sebesar Rp. 39.594.064.985

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.0. Secara rinci rencana pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.594.064.985	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.594.064.985	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	39.594.064.985	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	
	Pembiayaan Netto	39.594.064.985	

Rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 39.594.064.985, sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0. Sehingga, jumlah pembiayaan netto sebesar Rp. 39.594.064.985

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tuapejat, 10 Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Pj. BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

YOSEP, A. Md
KETUA

MARTINUS D.
Pj. BUPATI